



LLDIKTI 16
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI



Tahun 2025 LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. XVI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI tahun 2025. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI pada tahun 2024 menetapkan 4 sasaran dan 9 indikator kinerja. Secara umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya jumlah PTS yang terakreditasi masih rendah, tingkat partisipasi PTS dalam meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI pada tahun 2025

Gorontalo, 30 Januari 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah XVI



Munawir Sadzali Razak

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Gambaran Umum
- b. Dasar Hukum
- c. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi
- d. Isu -Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- a. Visi dan Misi
- b. Rencana Kerja Jangka Menengah
- c. Tujuan Strategis
- d. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir
- e. Program Prioritas

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

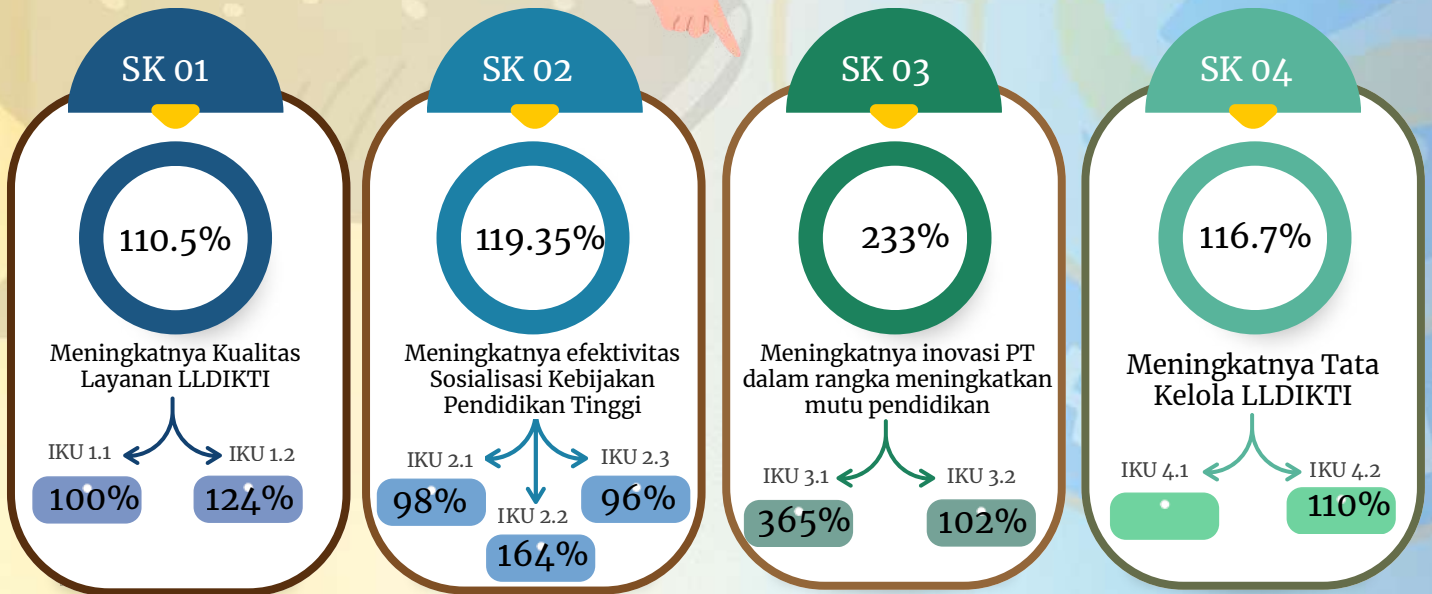
- a. Capaian Kinerja
- b. Realisasi Anggaran
 - 1. Capaian Anggaran
 - 2. Efisiensi Anggaran
- c. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative
 - 1. Inovasi
 - 2. Penghargaan
 - 3. Program Crosscutting/Colaborative

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir
 - 1. Perjanjian Kinerja Awal
 - 2. Perjanjian Kinerja Akhir
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

IKHTISAR EKSEKUTIF

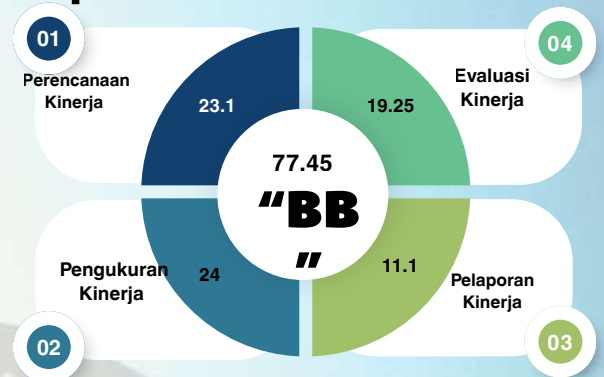


RATA - RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 : 140%

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025



Capaian Predikat SAKIP



Realisasi Anggaran

Pagu : 82.484.640.000

Rp. 78.132.840.902

98,2%

Sisa Rp.1.412.405.098

IKHTISAR EKSEKUTIF



**CAPAIAN
KINERJA
2025**

$\Sigma = 140\%$



SK.1

**Meningkatnya Kualitas
Layanan LLDIKTI**



SK.2

**Meningkatnya efektivitas
Sosialisasi Kebijakan
Pendidikan Tinggi**



SK.3

**Meningkatnya inovasi
Perguruan Tinggi dalam
rangka meningkatkan
mutu pendidikan**



SK.4

**Meningkatnya Tata
Kelola LLDIKTI**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Permasalahan Umum

01

Masih perlunya peningkatan kualitas layanan walaupun survei kepuasan layanan menunjukan hasil yang baik, serta fitur survei kepuasan pengguna hanya tersedia pada aplikasi SIPINTER

02

Keterbatasan kualitas SDM pada PTS dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta kurangnya kesadaran dan komitmen PTS dalam membangun budaya mutu

03

Masih banyak dosen yang terbiasa menerapkan kurikulum konvensional yang menitikberatkan pada pengembangan kompetensi sesuai jenjang pendidikan, sementara pendekatan Outcome-Based Education (OBE) berorientasi pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang terukur, aplikatif, dan harus dikuasai mahasiswa pada saat lulus

04

Forum kemahasiswaan belum terlaksana secara rutin sehingga diperlukan komitmen bersama untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaannya.

05

Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sehingga data PTS yang telah memperbarui SK sesuai ketentuan terbaru belum terpetakan secara akurat

06

Banyaknya naskah berkualitas rendah yang masuk serta - Proses indeksasi (SINTA/Scopus) yang semakin selektif

07

Komitmen dari mitra ataupun perguruan tinggi seringkali tidak berkelanjutan dan sangat tergantung pada perubahan kebijakan internal sehingga sulit untuk menindaklanjuti kerja sama.

08

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja.

09

Perubahan rencana dan jadwal kegiatan berdampak pada RPD dan pelaksanaan anggaran

Langkah Antisipatif

01

Melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan dan mengembangkan sistem survei kepuasan untuk setiap sistem layanan

02

Pemberian pelatihan analisis data kepada Staf LLDIKTI serta mengubah peran staf dari administrator data menjadi analis strategi dan melaksanakan workshop khusus untuk Pimpinan PTS mengenai pentingnya Budaya mutu sebagai strategi keberlanjutan institusi.

03

Melibatkan stakeholder dalam FGD kurikulum

04

Menetapkan jadwal kegiatan secara berkala dan menyusun agenda pembahasan yang fokus pada isu-isu kemahasiswaan yang aktual di PT.

05

Percepatan pembentukan Satgas PPKPT di seluruh PTS di LLDIKTI XVI sesuai Permendikbud ristek Nomor 55 tahun 2024

06

Melakukan kolaborasi dan jejaring antar PTS dan lembaga profesi untuk reviewer/Editor Internasional.

07

Peran aktif LLDIKTI untuk memfasilitasi PTS melakukan analisis tren kebutuhan industri serta melakukan Link & Match yang proaktif dengan PTS.

08

Penguatan sistem pengumpulan data kinerja berbasis digital secara bertahap dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia secara nasional maupun internal

09

Melakukan penyesuaian kembali anggaran dan RPD sesuai perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran, Monitoring realisasi anggaran dan output secara berkala.

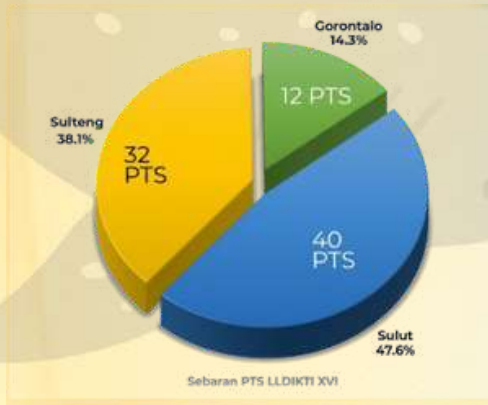


BAB.I

PENDAHULUAN



A. GAMBARAN UMUM



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo (LLDIKTI Wilayah XVI) merupakan satuan kerja Kemendikdisaintek yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. LLDIKTI Wilayah XVI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang secara administratif dibina oleh Sekjen Kemdikdisaintek dan secara teknis dibina Dirjen Pendidikan Tinggi.

LLDIKTI Wilayah XVI terbentuk melalui Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020. Sebelum LLDIKTI Wilayah XVI terbentuk, perguruan tinggi yang berada di Provinsi Sulut, Sulteng dan Gorontalo dilayani oleh LLDIKTI Wilayah IX yang berlokasi di Makassar. Dengan terbentuknya LLDIKTI Wilayah XVI, diharapkan pelayanan teknis dan administratif kepada perguruan tinggi menjadi lebih efektif dan efisien.

Saat ini Kepala LLDIKTI Wilayah XVI dijabat oleh Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala LLDIKTI Wilayah XVI dibantu oleh 1 orang pejabat administrator (Kepala Bagian Umum) dan 116 orang pegawai yang terdiri dari 46 orang pejabat fungsional dan pelaksana, 65 orang Dosen ASN DPK dan 5 orang PPPK.



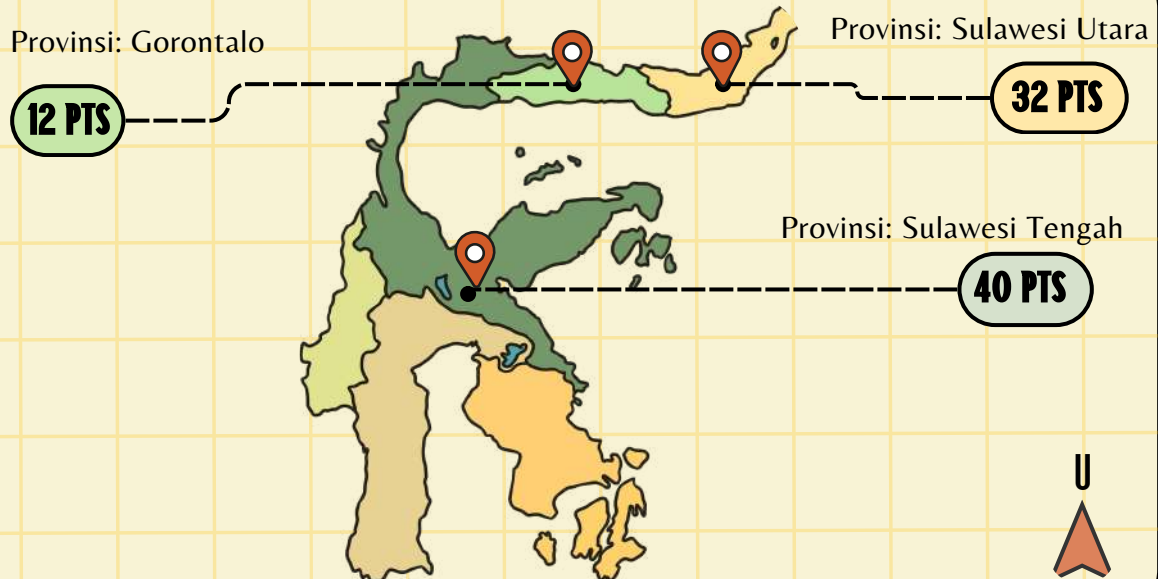


Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Gorontalo memiliki wilayah kerja yang mencakup 3 provinsi yakni Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada akhir tahun 2025 jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mitra kerja LLDIKTI sebanyak 84 PTS dan 526 Prodi dengan rincian sebagai berikut :



WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA LLDIKTI XVI



B. DASAR HUKUM

01

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

02

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

03

Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

04

Permendiktisaintek No. 1 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

05

Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Permendikbud No. 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi maka Tugas dan Fungsi LLDIKTI sebagai berikut :



TUGAS

“Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah”



FUNGSI

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi; | 06 | pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi; |
| 02 | Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi; | 07 | pelaksanaan kerja sama; |
| 03 | pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi; | 08 | pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; |
| 04 | pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal; | 09 | Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan |
| 05 | pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi; | 10 | Pelaksanaan administrasi. |

STRUKTUR ORGANISASI



MUNAWIR SADZALI RAZAK
KEPALA LLDIKTI Wil. XVI



IRWAN HALID
KEPALA BAGIAN UMUM



RIVAI HAMZAH
Ketua Tim Kerja Sumber Daya



AKUB ZAINAL BUSURA
Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan



NOVEL ACUB UMAR
Ketua Tim Kerja Riset dan PKM



FATRA J.D.P DANO PUTRI
Ketua Tim Kerja Kelembagaan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



PEGAWAI ASN 46
ORANG



PEGAWAI PPPK 5
ORANG



DOSEN DPK 65 ORANG

ISU DAN PERAN STRATEGIS



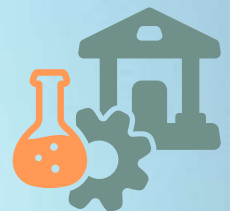
Masih terdapat tantangan besar dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi yang tercermin dari status dan peringkat akreditasi. PTS yang hanya memenuhi standar minimum tanpa melakukan terobosan dan inovasi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PTS yang berimbas pada turunnya jumlah mahasiswa yang mendaftar.

Sebagian besar PTS belum secara proaktif berpartisipasi dalam program-program peningkatan mutu yang difasilitasi oleh LLDIKTI. Rendahnya keterlibatan ini berdampak pada kualitas input, proses, output dan outcome perguruan tinggi serta menurunnya daya saing dan relevansi dari perguruan tinggi tersebut



Kerja sama dengan mitra Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) baik lokal, nasional maupun internasional. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan antara PTS dengan mitra DUDI masih menjadi tantangan tersendiri bagi LLDIKTI. Masih banyak program studi yang belum menjalin hubungan yang kuat dengan mitra. Tanpa kemitraan program studi yang strategis, relevansi dan daya saing lulusan PTS di dunia kerja kian berkurang.

Kinerja Kelembagaan dan Pengelolaan Keuangan PTS. Peningkatan kinerja kelembagaan dan pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional PTS. Kinerja yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian target strategis dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap PTS bahkan dapat menjadi sumber terjadinya konflik internal.



Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri. Tantangan dalam menerapkan program ini meliputi kurangnya pemahaman di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai konsep dan implementasinya. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, program ini tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi.

Mutu Layanan Akademik. Layanan akademik di PTS perlu ditingkatkan agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Layanan yang kurang memadai dapat mengurangi kepuasan mahasiswa dan berdampak negatif pada reputasi PTS

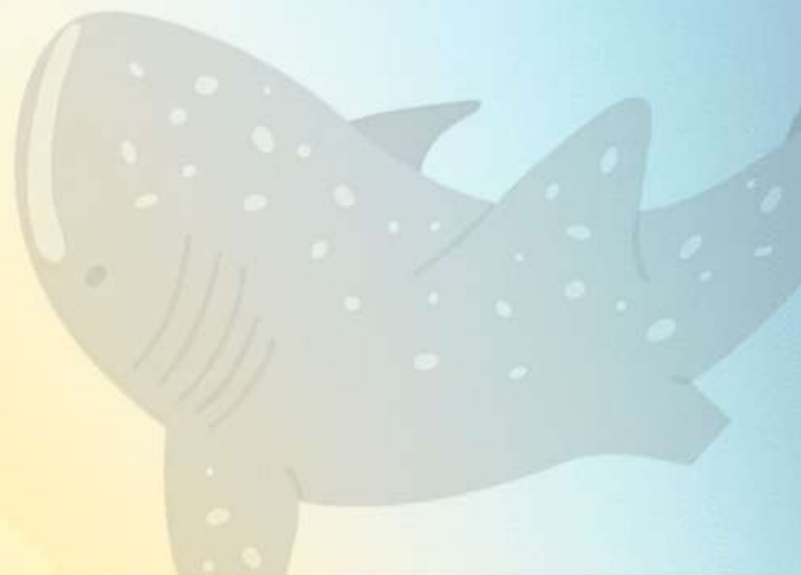




BAB.II

PERENCANAAN

KINERJA



VISI DAN MISI

VISI



Mewujudkan akselerasi tata nilai dan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih maju, berkualitas dan unggul, melalui strategi penjaminan mutu perguruan tinggi yang merata dan berkelanjutan di LLDIKTI XVI.

MISI



01

Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran sehingga menghasilkan output lulusan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam dunia kerja.



02

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bidang penelitian yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan dan bermanfaat praktis bagi masyarakat.



03

Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan praktis dan inovatif dalam menunjang akselerasi pembangunan regional maupun nasional secara fisik dan non fisik.



04

Membangun kemitraan dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu



05

Menciptakan tata kelola kelembagaan yang professional dan transparan dalam memberikan layanan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi.

RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH

Target Kinerja LLDIKTI Wil. XVI						
No.	IKS / IKK	Target Kinerja				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Meningkatnya Layanan LLDIKTI					
1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99,8	99,8	99,8	99,9	99,9
1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	79	80	81	82
2	Meningkatnya efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi					
2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61,9	63,1	64,3	65,5	66,7
2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2,63	2,65	2,66	2,68	2,69
2.3	Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95,2	96,4	97,6	98,8	100
3	Meningkatnya inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan					
3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	26,2	27,4	28,6	29,8
3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI					
4.1	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	91	91,5	92	92,5	93



TUJUAN STRATEGIS

1. Meningkatnya mutu layanan akademik dan kelembagaan pendidikan tinggi.
2. Meningkatnya kualifikasi pendidikan dosen dan jabatan fungsional dosen.
3. Meningkatnya capaian peringkat akreditasi institusi dan program studi.
4. Meningkatnya Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus merdeka melalui program mahasiswa berkegiatan di luar kampus paling sedikit 20 SKS.
5. Terwujudnya implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi pada perguruan tinggi swasta.
6. Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan kegiatan tridharma di luar kampus.
7. Meningkatnya jumlah program studi yang melakukan kerjasama dengan industry dan mitra luar negeri.
8. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan keuangan LLDIKTI Wilayah XVI.

SASARAN STRATEGIS



Meningkatnya tata kelola LLDIKTI Wilayah XVI



Meningkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XVI



Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi



Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan



PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja awal Tanggal 20 Mei 2025

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	78
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	BB
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 58.784.863.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 16.578.166.000
Total Anggaran			Rp. 75.363.029.000

B. Perjanjian Kinerja Akhir Tanggal 3 Januari 2026

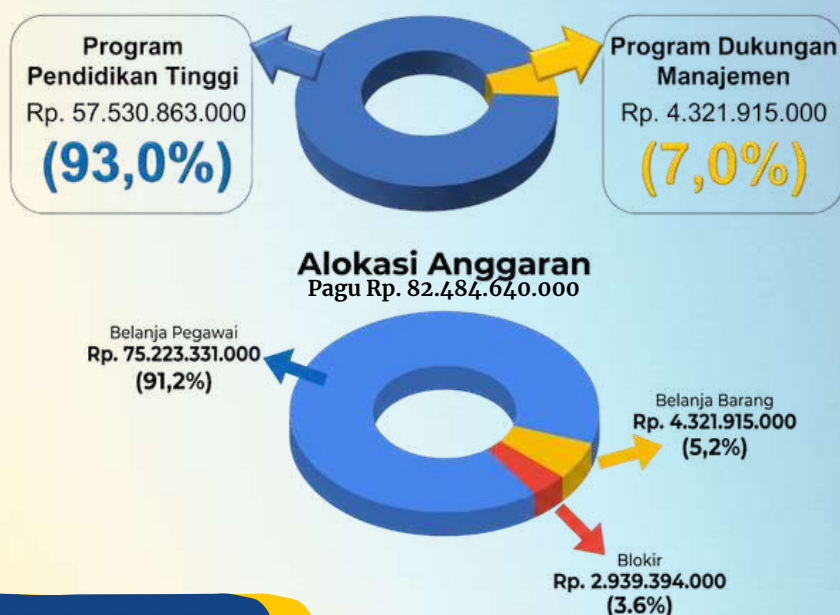
Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	99.8
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	78
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	61.9
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	2.63
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	95.2
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	25
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	57.14
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp57.530.863.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp24.953.777.000
Total Anggaran			Rp82.484.640.000

PROGRAM PRIORITAS

- 01** Peningkatan Kualitas Layanan melalui SPBE
- 02** Penguatan Tata Kelola Organisasi melalui ZI-WB
- 03** Penguatan Akuntabilitas Organisasi melalui SAKIP
- 04** Pengarusutamaan Program "Diktisaintek Berdampak"
- 05** Penguatan Mutu PTS melalui Kolaborasi dengan Mitra Strategis dan Penguatan Kompetensi Dosen
- 06** Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan PTS

ALOKASI ANGGARAN



LINIMASA PERUBAHAN ANGGARAN

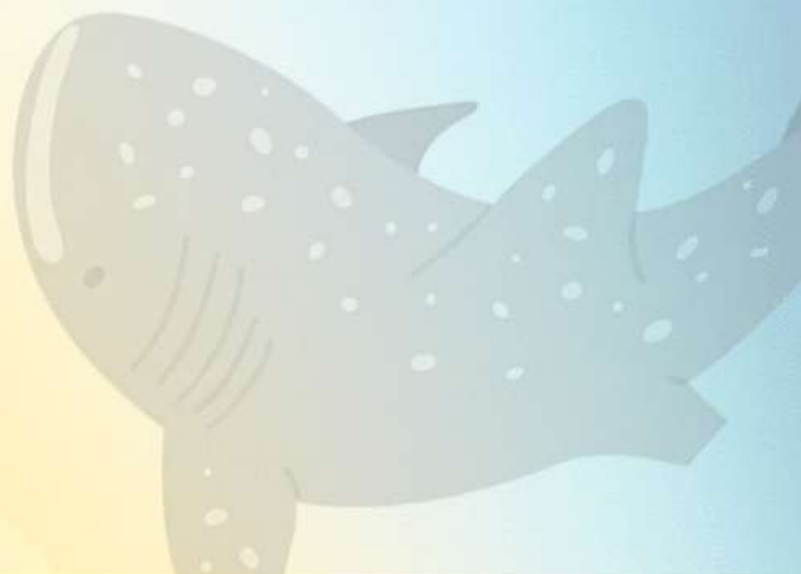
Linimasa Perubahan Anggaran





BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA



IKHTISAR EKSEKUTIF



CAPAIAN KINERJA $\Sigma = 140\%$
2025

SK.1

Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI



SK.2

Meningkatnya efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi



SK.3

Meningkatnya inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan



SK.4

Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI



ANALISA DAN PENGUKURAN KINERJA

SASARAN KINERJA 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN LLDIKTI



Ketercapaian sasaran kinerja utama terkait dengan peningkatan kualitas LLDIKTI Wilayah XVI ditandai dengan tingginya tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah XVI. Skor 100% ini mengindikasikan bahwa persepsi pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap kualitas layanan, daya tanggap, dan profesionalisme LLDIKTI sangat baik dan stabil sesuai dengan ekspektasi manajemen.

Selain itu ketercapaiannya juga dilihat dari peningkatan Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain. Dimana, kedua hal tersebut dijadikan sebagai indikator kinerja utama untuk sasaran kinerja ini. Capaian sebesar 121% menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Ini berarti jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kualitasnya (baik melalui akreditasi maupun merger/konsolidasi) jauh lebih banyak daripada yang diproyeksikan. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembinaan, pendampingan akreditasi, atau insentif konsolidasi yang dijalankan oleh LLDIKTI sangat efektif dalam mendorong PTS untuk meningkatkan mutu kelembagaannya.

CAPAIAN KINERJA IKU 2.1

“KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP LAYANAN UTAMA LLDIKTI “

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

Merupakan perbandingan antara jumlah responden penggunaan layanan yang menyatakan puas atas pelayanan LLDIKTI XVI berupa layanan akademik, layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan, dan layanan terkait administrasi.

Formula perhitungan
Indikator Kinerja

$$(n / t) \times 100 = \%$$

n = Respon pengguna layanan LLDIKTI yang puas



Respon pengguna layanan
LLDIKTI yang puas

t = Total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI



Total jumlah responden
pengguna layanan LLDIKTI

Adapun hasil perhitungan formula sebagai berikut :



Kinerja IKU 1.1 ini tidak tercapai disebabkan masih terdapat tantangan berupa adaptasi sebagian pegawai terhadap penerapan standar pelayanan baru yang memerlukan penyesuaian pola kerja. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan menyebabkan belum seluruh pegawai dapat memperoleh pemahaman yang merata terhadap perubahan prosedur pelayanan.

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN

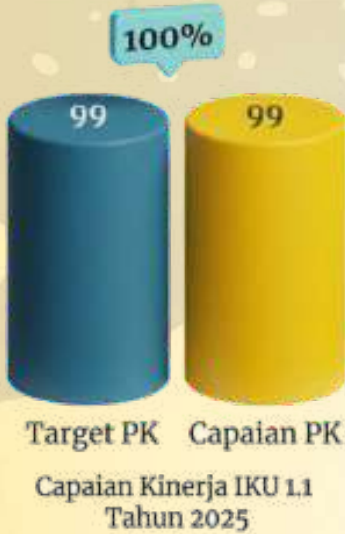


Diagram disamping ini menunjukkan Kinerja untuk indikator IKU 1.1 dinilai Sangat Baik/Optimal. Grafik ini juga menunjukkan LLDIKTI XVI berhasil memenuhi komitmen "Perjanjian Kinerja" (PK) secara penuh tanpa kekurangan. Ini menunjukkan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif.

Diagram disamping ini menunjukkan, bahwa mempertahankan nilai 99 (yang hampir menyentuh nilai maksimal 100) selama dua tahun berturut-turut jauh lebih sulit daripada sekadar mencapainya sekali. Ini menunjukkan bahwa standar kerja tinggi sudah menjadi budaya atau sistem yang mapan, bukan sekadar kebetulan.



Grafik ini menunjukkan bahwa kinerja operasional tahunan (PK) sangat selaras dengan perencanaan strategis jangka panjang (Renstra). Tidak ada gap atau kesenjangan antara apa yang dicita-citakan dalam rencana strategis dengan eksekusi di lapangan pada tahun 2025.



Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa kegiatan baik yang menjadi standar layanan maupun tidak. Adapun yang termasuk dalam standar pelayanan publik meliputi layanan berikut :

- Rekomendasi pembuatan akun PDDIKTI
- Usulan akun verifikasi SINTA Perguruan Tinggi
- Usulan perubahan afiliasi Dosen di SINTA
- Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Alih kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Penyatuan dan Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Perubahan nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Perubahan nama Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Pembukaan Program studi baru
- Perubahan nama program studi
- Pelayanan tamu pimpinan
- Fasilitasi penguatan dosen dalam bidang penelitian
- Usulan pengaktifan kembali dosen
- Penerbitan kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami
- Pengurusan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS
- Pelayanan Informasi Publik
- Rekomendasi Beasiswa
- Rekomendasi Tugas belajar
- Usul perpanjangan tugas belajar
- Rekomendasi Tugas Belajar Bagi PNS
- Pengurusan pensiun PNS
- Pengurusan Pangkat Penyetaraan
- Pangkat Inpassing
- Fasilitasi penyelesaian konflik PT dan BP
- Kenaikan Pangkat PNS
- Pencantuman gelar
- Rekomendasi pindah hombase dosen
- Fasilitasi penguatan dosen dalam bidang pengabdian



FAKTOR KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai LLDIKTI XVI untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Tersedianya POS-AP dan SPP untuk setiap layanan yang ada pada LLDIKTI Wilayah XVI



PROGRAM DAN KEGIATAN



**PENGEMBANGAN
APLIKASI DASBOR
LLDIKTI WILAYAH XVI**



**PENGEMBANGAN
APLIKASI PRIMA16**



**PENGEMBANGAN
SIPINTER**



HELPDESK GO



**WEBINAR
MANAJEMEN
PERUBAHAN**

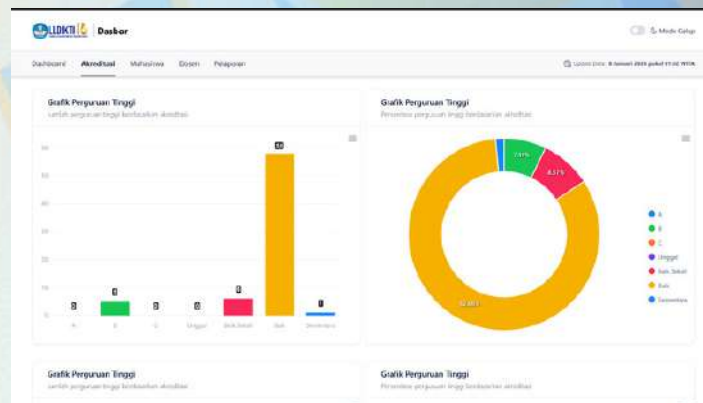
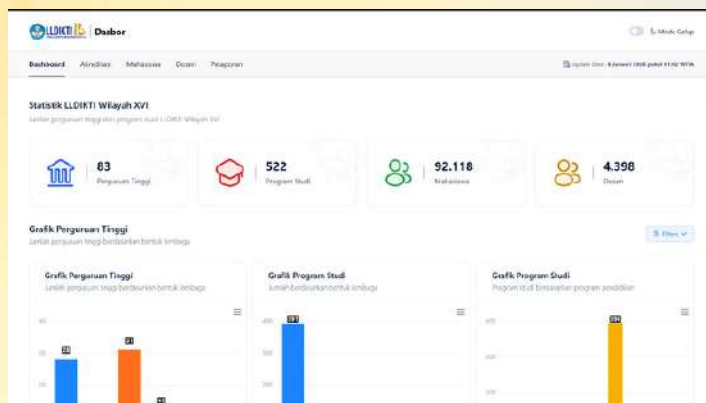


**REVIEW POS-AP
DAN SPP**

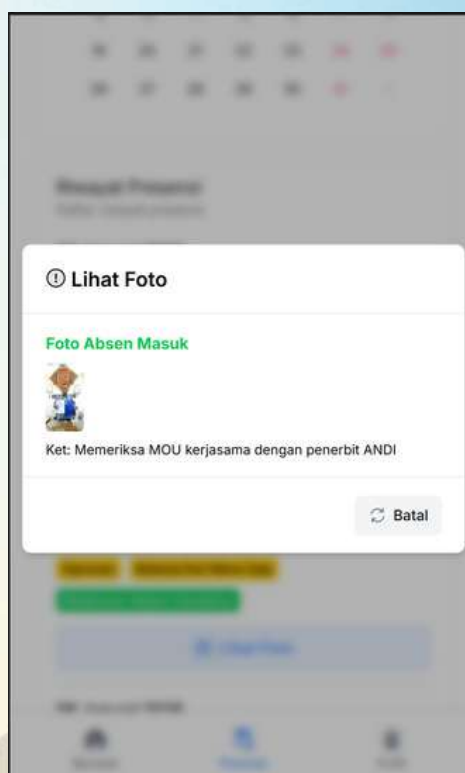
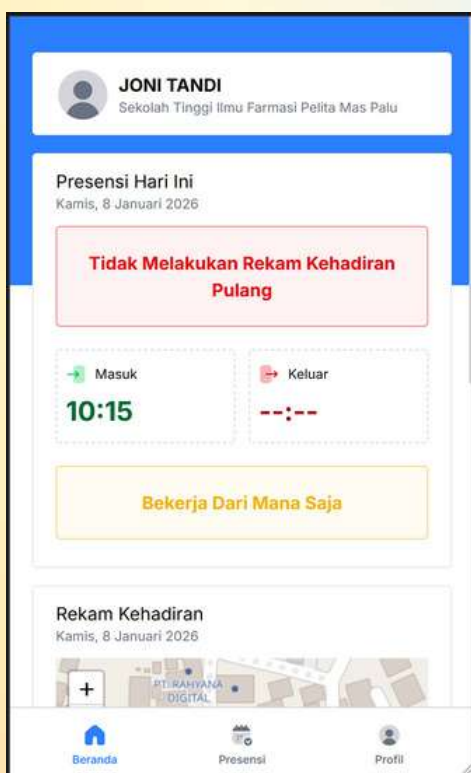


DOKUMENTASI PENDUKUNG

DASHBOARD LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI XVI



APLIKASI PRIMA16



DOKUMENTASI PENDUKUNG

LOKAKARYA MANAJEMEN PERUBAHAN



KENDALA DAN PERMASALAHAN



PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Masih perlunya peningkatan kualitas layanan walaupun survei kepuasan layanan menunjukan hasil yang baik.



FITUR SURVEI PADA APLIKASI SIPINTER

Fitur survei kepuasan pengguna hanya tersedia pada aplikasi SIPINTER.



TANTANGAN PARTISIPASI & POLA KERJA

Partisipasi peserta belum maksimal karena perbedaan jadwal kerja, serta masih adanya penyesuaian terhadap pola kerja baru yang membutuhkan waktu untuk diterapkan secara optimal.

LANGKAH ANTISIPATIF



MELAKUKAN MONITORING BERKALA

Melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan.



MENGEMBANGKAN SISTEM SURVEI

Mengembangkan sistem survei kepuasan untuk setiap sistem layanan.



MELAKUKAN PEREKAMAN KEGIATAN

Melakukan perekam perekam kegiatan agar pegawai yang tidak hadir tetap bisa mengikuti materinya melalui video.

STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA



SOSIALISASI & PENDAMPINGAN BERTAHAP

- Memastikan seluruh pegawai memahami dan menerapkan standar pelayanan publik yang diperbarui secara terstruktur.



PENGUATAN MONITORING & EVALUASI INTERNAL

- Mengidentifikasi hambatan implementasi serta memastikan konsistensi pelayanan antar unit.



MEKANISME UMPAN BALIK PENGGUNA SEDERHANA

- Mendorong partisipasi untuk hasil pengukuran IKU 1 yang lebih akurat dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

CAPAIAN KINERJA IKU 1.2

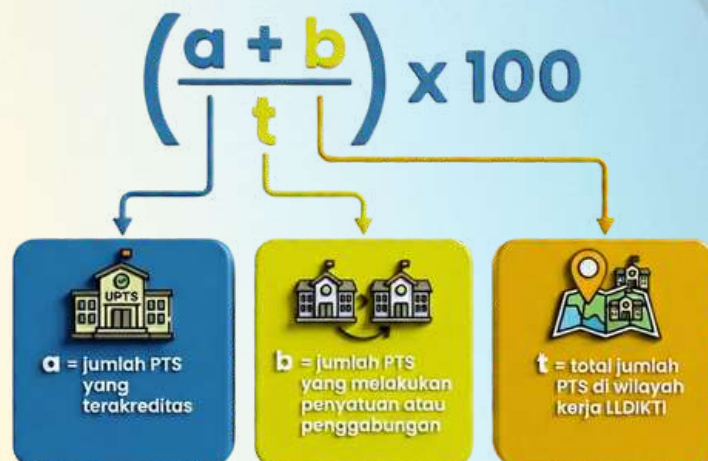
PERSENTASE PTS YANG TERAKREDITASI ATAU MENINGKATKAN MUTU DENGAN CARA PENGGABUNGAN DENGAN PTS LAIN

Indikator kinerja ini diukur dengan memperhitungkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Sedangkan Penggabungan satu atau lebih Perguruan Tinggi menjadi satu Perguruan Tinggi baru atau penyatuan ke dalam satu perguruan tinggi lain. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja ini berasal dari Tim Kerja kelembagaan

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA



Berdasarkan hasil analisa dari total 81 PTS yang berada di LLDIKTI Wilayah XVI sebanyak 76 PTS telah terakreditasi. Hasil pengukuran menunjukkan target indikator pada IKU ini yakni sebesar 94%. Capaian ini melebihi target pada perjanjian kinerja (capaian 121%). Hasil perhitungan capaian kinerja ini yakni sebagai berikut :

Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

FORMULA & KALKULASI

$$\left(\frac{a + b}{t} \right) \times 100 = x$$

$$\left(\frac{76 + 81}{100} \right) \times 100 =$$

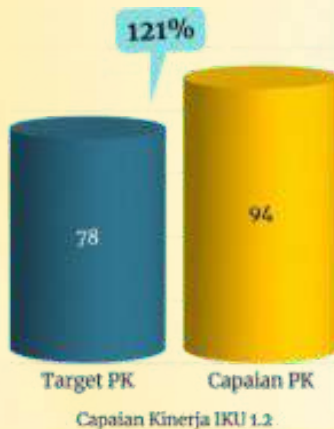


 a = jumlah PTS yang terakreditasi

 b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan

 t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN



Grafik disamping ini menunjukkan performansi positif LLDIKTI XVI yang diukur pada IKU 1.2 tidak hanya berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, tetapi melampauinya secara signifikan atau melampaui target sebesar 21% di atas ekspektasi awal (100% + 21%).

Dari diagram disamping menunjukkan tren kenaikan yang jelas. Pertumbuhan sebesar 20,5% dalam satu tahun dianggap sebagai peningkatan kinerja yang sangat solid dan signifikan dalam konteks manajemen kinerja. Tahun 2025 merupakan tahun yang jauh lebih produktif atau sukses dibandingkan tahun 2024, dengan kenaikan kinerja lebih dari 20%.



Dari diagram disamping kenaikan yang jelas. Pada tahun 2025, kami tidak hanya mencatat pertumbuhan kinerja positif sebesar 20,5% dibanding tahun sebelumnya, tetapi juga berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan capaian 121%. Hal ini membuktikan efektivitas strategi baru yang diterapkan tahun ini."

FAKTOR KEBERHASILAN

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai LLDIKTI XVI untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Tersedianya POS-AP dan SPP untuk setiap layanan yang ada pada LLDIKTI Wilayah XVI



PROGRAM DAN KEGIATAN

Fasilitasi Kinerja Kelembagaan



Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Perguruan Tinggi



Bimtek Strategi
Peningkatan APS
Unggul & Internasional
bagi Prodi B Perguruan
Tinggi Swasta



Bimtek Aspek Legalitas
Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi



Training of Trainers
(ToT) Penyelesaian
Sengketa Badan
Penyelenggara PTS



Evaluasi dan Visitasi
Lapangan



Layanan Bidang Kelembagaan



Facilitasi Kinerja Sumberdaya PT

1. Sosialisasi Pengembangan Kualifikasi, Karir dan Kompetensi Dosen
2. Monitoring dan Evaluasi Data Dosen terkait Kualifikasi, Karir dan Kompetensi Dosen
3. Workshop Penyusunan Pelaporan BKD pada Aplikasi Sisternas
4. Sosialisasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan Dan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Dosen



Kinerja Peningkatan Jumlah JFT Dosen Tahun 2024 dan 2025

Fasilitasi Kinerja Riset dan Abdimas

1. Strategi Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Pelatihan Penyusunan RAB Hibah Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
3. Workshop Peningkatan Perolehan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Paten Di PT
4. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Sulut
5. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Sulteng
6. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Gorontalo
7. Bimtek Penulisan Karya Ilmiah bagi Dosen Lektor dan Lektor Kepala
8. Pengelolaan OJS Bagi Pengelola Jurnal Lingkup LLDIKTI XVI
9. Bimtek Peningkatan Akreditasi Jurnal
10. Bimtek Merancang Penelitian bagi Dosen Pemula
11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPPM dan Hibah Penelitian dan PKM

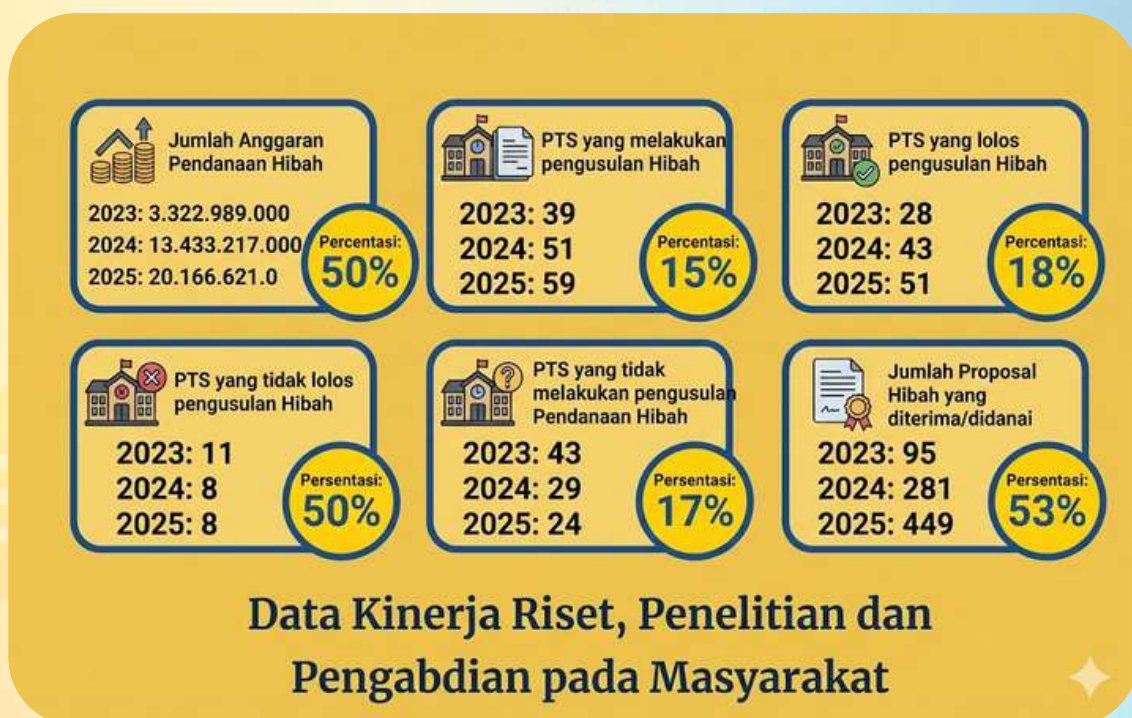


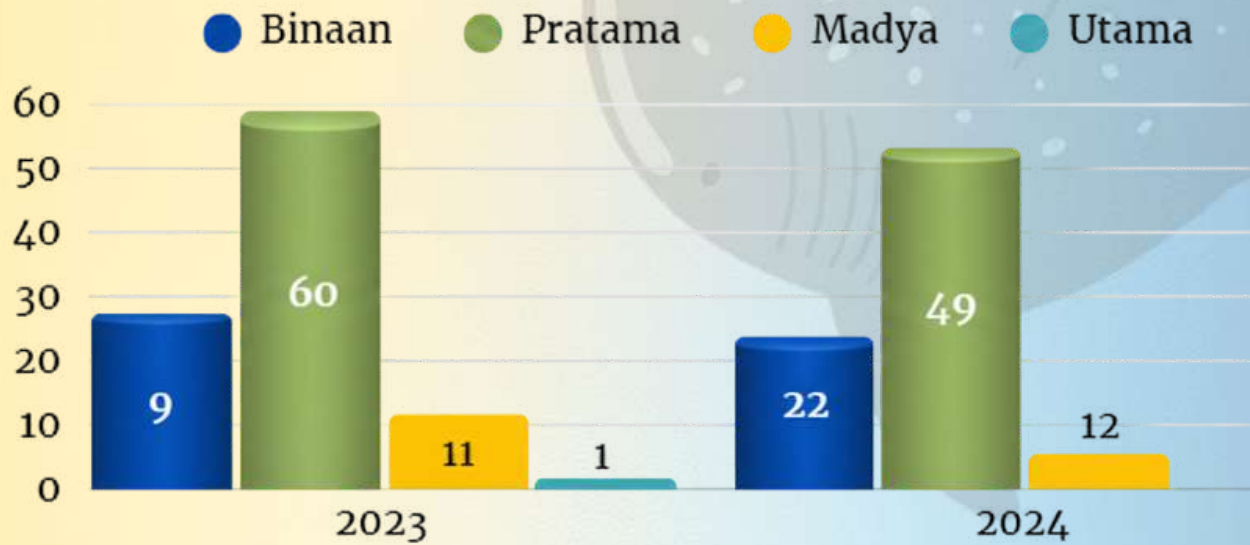
Data PTS yang Memiliki Jurnal

Grafik diatas menunjukkan hampir Setengah PTS belum patuh: Angka 44,4% (36 PTS) yang tidak memiliki jurnal adalah angka yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan untuk standar institusi pendidikan tinggi. Jurnal adalah wadah utama bagi dosen untuk mempublikasikan hasil riset. Tanpa jurnal internal, budaya riset di institusi tersebut mungkin belum terbangun dengan baik, sehingga berisiko mendapatkan nilai rendah pada standar penelitian dan luaran (output), yang bisa menghambat peningkatan peringkat akreditasi mereka.



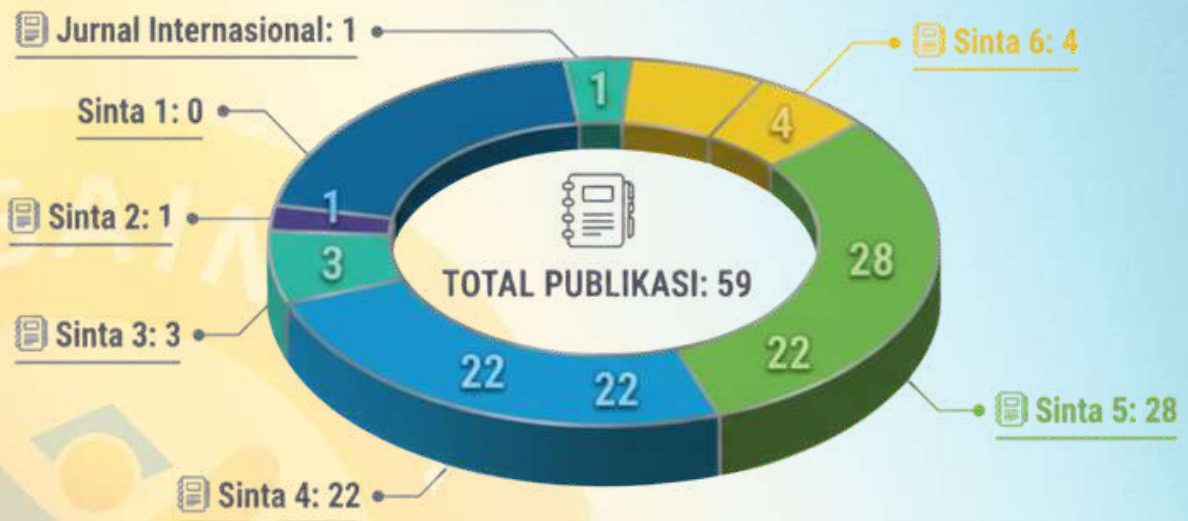
Grafik ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah jurnal yang ada (157) sudah cukup banyak. Namun, kualitas formal (akreditasi) masih tertinggal. Mayoritas jurnal (62,4%) masih berstatus belum terakreditasi. Ini menunjukkan bahwa banyak jurnal mungkin baru berdiri, kurang pengelolaan manajemen editorial, atau belum memenuhi standar minimal akreditasi nasional (SINTA/Arjuna).





Data Klaterisasi Penelitian dan PKM

DATA PUBLIKASI JURNAL



DOKUMENTASI PENDUKUNG

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi



Bimtek Strategi Peningkatan APS Unggul & Internasional bagi Prodi B Perguruan Tinggi Swasta



DOKUMENTASI PENDUKUNG

Bimtek Aspek Legalitas Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi



Training of Trainers (ToT) Penyelesaian Sengketa Badan Penyelenggara PTS



HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. Masih ditemukan kendala terkait ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data kinerja PTS.
2. Permintaan dan analisis data masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan keterlambatan pada penyajian data.
3. Keterbatasan anggaran operasional perguruan tinggi dalam pengajuan usulan dokumen akreditasi terutama bagi program studi yang berada di bawah naungan Lembaga Akreditasi Mandiri.
4. Keterbatasan kualitas SDM pada PTS dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
5. Kurangnya kesadaran dan komitmen PTS dalam membangun budaya mutu
6. Terbatasnya wewenang LLDIKTI XVI dalam penyelesaian sengketa badan penyelenggara yang menyebabkan masalah tidak kunjung selesai.
7. Retensi pengetahuan dan keahlian mediasi pada SDM internal tidak berkelanjutan karena jarang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa sehingga efektivitas tim dapat menurun seiring waktu.

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

1. Penerapan Kebijakan layanan LLDIKTI yang hanya akan diproses setelah PTS telah masuk pada kategori kepatuhan data minimal PDDIKTI. (Data First)
2. Pengembangan Sistem untuk informasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
3. Pemberian pelatihan analisis data kepada Staf LLDIKTI serta mengubah peran staf dari administrator data menjadi analis strategi.
4. Melaksanakan workshop khusus untuk Pimpinan PTS mengenai pentingnya Budaya mutu sebagai strategi keberlanjutan institusi.
5. Sistem reward berbasis mutu kepada PTS yang menunjukkan perbaikan komitmen dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terbaik untuk mendorong kompetisi positif.
6. Terus melakukan pengembangan kompetensi keahlian SDM internal dalam upaya penyelesaian sengketa dan peningkatan budaya mutu PTS.

ANALISA DAN PENGUKURAN KINERJA

SASARAN KINERJA 2 : MENINGKATNYA EFEKTIFITAS SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI



Terdapat 2 IKU yang tidak tercapai pada sasaran kinerja 2 ini . Salah satu kendala utama dalam penguatan implementasi IKU III adalah belum optimalnya sistem pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada PTS, baik dari sisi pembaruan data maupun integrasi antarplatform. Sebagian PTS belum melakukan pelaporan secara berkala dan konsisten, sementara data yang tersedia masih tersebar pada berbagai sistem internal perguruan tinggi yang belum terhubung dengan sistem pelaporan IKU secara terpusat. Kondisi ini menyulitkan proses monitoring, validasi data, serta pemetaan capaian IKU III secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu, perubahan fokus kebijakan nasional, yang semula berorientasi pada implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dan kini bergeser ke arah Kampus Berdampak, menimbulkan tantangan adaptasi di tingkat perguruan tinggi. Sebagian PTS masih berada pada tahap penyesuaian terhadap arah kebijakan baru tersebut, khususnya dalam mengaitkan kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan indikator dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Perubahan ini juga berdampak pada perlunya penyesuaian format pelaporan dan indikator kinerja yang selaras dengan kebijakan terkini, yang hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara merata oleh PTS.

CAPAIAN KINERJA IKU 2.1

PERSENTASE PTS YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Yaitu keterlibatan PTS dalam program pembelajaran di luar program studi yakni Kebijakan Kampus Merdeka, Antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing).

Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif :

- Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
- Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.
- Pertukaran pelajar mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
- Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

$$\left(\frac{n}{t} \right) \times 100$$



Adapun formula dan hasil perhitungan sebagai berikut :



n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN



Grafik ini menunjukkan bahwa Capaian sebesar 98% menunjukkan performa yang sangat tinggi dan efektif. Meskipun tidak mencapai angka 100% secara mutlak, realisasi ini berada dalam rentang toleransi yang sangat kecil dari target yang ditetapkan. Hanya terdapat selisih 1 poin (62 - 61) antara target dan realisasi. Ini mengindikasikan bahwa perencanaan (target) dan eksekusi (capaian) sudah sangat selaras.



Grafik ini merupakan perbandingan kinerja Year-on-Year (YoY) atau tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja LLDIKTI XVI relatif stabil dan tidak mengalami anjlok yang drastis. Namun, arah pergerakannya negatif karena gagal mempertahankan atau melampaui angka tahun sebelumnya. kinerja tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Meskipun penurunannya tipis (hanya 1 poin), hal ini perlu menjadi perhatian evaluasi.

Berdasarkan grafik ini, kinerja tahun 2025 dianggap sangat sukses karena berhasil memenuhi target jangka panjang (Renstra) secara presisi. Tidak ada gap antara perencanaan strategis dan realisasi.



FAKTOR KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET

1. Kendala Teknis: Sistem Pelaporan dan Integrasi Data

Hambatan pertama berfokus pada infrastruktur data dan kedisiplinan pelaporan yang belum optimal.

- Sistem Pelaporan Belum Optimal: Terdapat masalah dalam pembaruan data maupun integrasi antarplatform untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- Inkonsistensi Pelaporan: Sebagian PTS belum melakukan pelaporan data secara berkala dan konsisten.
- Fragmentasi Data : Data yang ada masih tersebar di berbagai sistem internal kampus dan belum terhubung (terintegrasi) dengan sistem pelaporan IKU pusat.

2. Kendala Strategis: Adaptasi Perubahan Kebijakan

Hambatan kedua berkaitan dengan pergeseran fokus kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat dari pihak kampus.

- Pergeseran Fokus Kebijakan: Terjadi perubahan orientasi dari sekadar implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) menjadi Kampus Berdampak.
- Tantangan Adaptasi PTS: PTS masih dalam tahap penyesuaian untuk mengaitkan kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan indikator dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- Penyesuaian Format: Perubahan fokus ini mengharuskan adanya penyesuaian format pelaporan dan indikator kinerja agar selaras dengan kebijakan terkini.
- Kurangnya Pemahaman: Format dan indikator baru tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara merata oleh seluruh PTS.

PROGRAM DAN KEGIATAN



WORKSHOP KURIKULUM OBE

Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE)



BIMTEK STEAM DALAM OBE

Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi dengan Mengintegrasikan Pendekatan STEAM dalam Paradigma Outcome Based Education (OBE) bagi Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XVI



OPTIMALISASI TEKNOLOGI DARING (LMS)

Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pembelajaran daring (LMS) bagi dosen nana perguruan tinggi swasta

DOKUMENTASI PENDUKUNG

Workshop Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE)



HAMBATAN DAN PERMASALAHAN



- Lldikti belum melakukan Monev sehingga belum dapat memetakan PTS yang mengalami kendala terkait dengan pembelajaran diluar prodi.

- Masih banyak dosen yang terbiasa dengan kurikulum konvensional yang fokus pada pengembangan kompetensi sesuai jenjang pendidikan, Sedangkan OBE berfokus pada hasil pembelajaran (*outcome*) yang terukur dan aplikatif yang harus dikuasai mahasiswa saat lulus.



LANGKAH ANTISIPATIF DAN STRATEGI

1. Penguatan Sistem Pelaporan IKU III

LLDIKTI Wilayah XVI berfokus pada perbaikan mekanisme pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU) III agar lebih efektif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Langkah-langkahnya meliputi:

1. Penyusunan Mekanisme Baru : Membuat sistem pelaporan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses oleh PTS.
2. Pendampingan Teknis: Memberikan edukasi terkait tata cara pelaporan yang paling mutakhir.
3. Standarisasi Data: Menyeragamkan format data yang dilaporkan agar konsisten.
4. Optimalisasi Platform: Memastikan platform pelaporan terhubung langsung dengan sistem informasi pembelajaran dan kerja sama di masing-masing perguruan tinggi.

2. Sinkronisasi Pemahaman Kebijakan (MBKM ke Kampus Berdampak)

Terdapat upaya menyamakan persepsi PTS mengenai pergeseran fokus kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuju "Kampus Berdampak", terutama dalam konteks pembelajaran di luar program studi. Kegiatannya mencakup:

- Metode Pelaksanaan: Melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan forum diskusi.
- Fokus Utama: Menekankan keterkaitan antara aktivitas belajar lintas prodi, kolaborasi dengan mitra, serta kontribusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

3. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil dari penguatan pelaporan dan sinkronisasi tersebut akan digunakan sebagai landasan strategis untuk masa depan, antara lain:

- Dasar Rekomendasi Kebijakan: Menyusun rekomendasi yang berbasis data.
- Perbaikan Strategi Pendampingan: Mengevaluasi cara pendampingan agar lebih tepat sasaran.
- Pemetaan Kesiapan PTS: Mengukur tingkat capaian dan kesiapan PTS dalam mengimplementasikan IKU III pada periode berikutnya.
- Keselarasan Kebijakan: Memastikan seluruh langkah sejalan dengan arah kebijakan "Kampus Berdampak" yang ditetapkan kementerian.



CAPAIAN KINERJA IKU 2.2

PERSENTASE PTS YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI PERSENTASE MAHASISWA S1 ATAU D4/D3/D2/D1 PTS YANG MENJALANKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI ATAU MERAIH PRESTASI

Yaitu jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program pembelajaran di luar program studi yakni Kebijakan Kampus Merdeka, sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Adapun kegiatan yang boleh dikombinasikan dan di hitung kumulatif :

- Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
- Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.
- Pertukaran pelajar mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
- Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

Kriteria Prestasi adalah mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 yang berhasil :

- Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada komiteisi :
 - Tingkat Internasional
 - Tingkat Nasional atau
 - Tingkat Provinsi
- Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat
- Mendapatkan sertifikasi kompetisi internasional

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

$$\frac{\sum_{i=1}^n n_{ki}}{t} \times 100$$

n = Jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria



Jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja yang memenuhi kriteria

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut :



Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berprestasi, bobot maksima yang dapat diberikan adalah 1

t = Total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI



Total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI

Matriks bobot SKS :

- $X \leq 20$ bobot = 1
- $10 \leq x < 20$ bobot = 0,5



Matriks bobot prestasi :

Tingkat wilayah kompetisi :

- Internasional , bobot 0,75
- Nasional, bobot 0,5
- Provinsi , bobot 0,25



PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN

Dari bagan disamping menunjukkan bahwa Kinerja untuk IKU 2.2 ini sangat positif dan memuaskan. LLDIKTI XVI dinilai berhasil mencapai hasil yang jauh lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian di atas 100% (terutama setinggi 164%) dianggap sebagai prestasi kinerja "Sangat Baik" atau "Istimewa".





Dari bagan disamping menunjukkan bahwa adanya lonjakan kinerja yang sangat positif dari tahun 2024 ke 2025. Ini menunjukkan adanya perbaikan proses, strategi yang lebih efektif, atau efisiensi yang sukses diterapkan pada tahun 2025. Grafik ini mengonfirmasi bahwa LLDIKTI XVI tidak hanya memenuhi target, tetapi juga secara konsisten memperbaiki diri dibandingkan kinerja masa lalu (historical performance).

Grafik ini menunjukkan keberhasilan jangka panjang dengan membandingkan hasil aktual terhadap Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan atau jangka menengah. Capaian tahun ini sudah melampaui target Renstra sebesar 164% menunjukkan akselerasi pencapaian tujuan organisasi yang lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan.



Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk IKU 2.2 mencatatkan hasil yang sangat istimewa dengan skor capaian sebesar 4.33. Angka ini menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan secara menyeluruh, di mana organisasi berhasil melampaui tiga tolak ukur utama sekaligus.

Secara spesifik, capaian ini berada 164% di atas target yang ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja (Target PK: 2.63) maupun Rencana Strategis Jangka Menengah (Target Renstra: 2.63). Selain itu, momentum perbaikan kinerja terlihat sangat kuat dengan adanya pertumbuhan signifikan sebesar 70,5% dibandingkan realisasi tahun 2024 (2.54). Konsistensi pencapaian di atas standar ini mengindikasikan efektivitas manajemen yang tinggi dan akselerasi pencapaian tujuan organisasi yang lebih cepat dari ekspektasi.

FAKTOR KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai LLDIKTI XVI untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi pengguna serta partisipasi aktif dari stakeholder yang ada di LLDIKTI Wilayah XVI

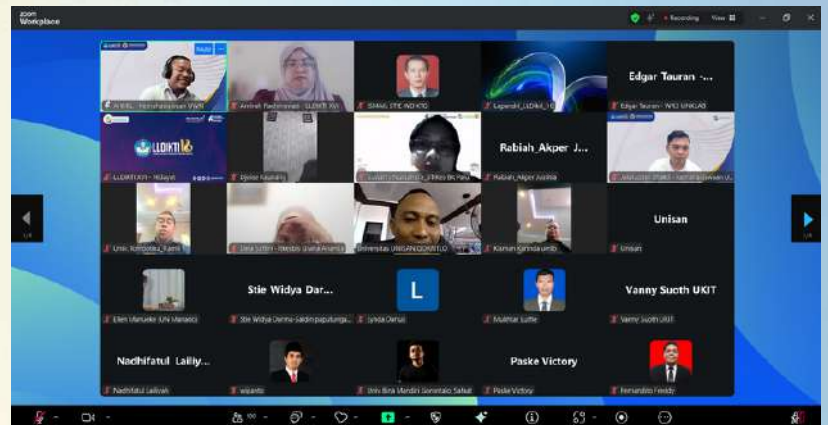


PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Webinar Praktik Baik kepada tim Kemahasiswaan PT untuk mendorong kemahasiswaan yang dapat mengarahkan mahasiswa aktif dalam kegiatan di luar kelas dan mengembangkan kemampuan hardskill/softskill
2. Webinar HOPE Talk (1-5)
3. Wadah Komunika dengan BEM untuk membimbing dan mendorong organisasi kemahasiswaan berkegiatan yang berdampak (Salah satunya mendorong untuk turun dalam merespon kebencanaan)
4. Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat LLDIKTI XVI

DOKUMENTASI PENDUKUNG

Webinar Praktik Baik kepada tim Kemahasiswaan PT untuk mendorong kemahasiswaan yang dapat mengarahkan mahasiswa aktif dalam kegiatan di luar kelas dan mengembangkan kemampuan hardskill/softskill



HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. Masih belum terlaksana rutinan forum kemahasiswaan, dibutuhkan komitmen bersama
2. Antusias Mahasiswa yang sangat tinggi untuk ikut berbagai webinar kemahasiswaan, butuh tindak lanjut seperti bagaimana bisa terus menjaga semangat dan menindaklanjuti bagaimana pelatihan terlihat outputnya mahasiswa meningkat prestasinya/aktivitas di luar kampus
3. Masih belum aktif grup yang sudah ada, pada koordinasi diawal hanya 15 perwakilan BEM yang hadir, kedepan harus dibuat pertemuan online rutinan dan terukur setiap pertemuannya apa saja yang mau ditingkatkan / dikembangkan dari organisasi mahasiswa.
4. Masih sedikitnya PTS yang mendaftar, PTS merasa belum siap bersaing dengan Perguruann Tinggi Negeri

LANGKAH ANTISIPATIF DAN STRATEGI

- Melanjutkan program pendampingan teknis secara bertahap bagi PTS yang siap mengimplementasikan pembelajaran di luar program studi, termasuk melalui lokakarya lanjutan terkait pengakuan kredit (rekognisi pembelajaran), pengelolaan konten digital, dan sistem pembelajaran daring.
- Selain itu, akan dilakukan pemetaan lanjutan terhadap kesiapan infrastruktur dan sumber daya PTS serta penguatan monitoring dan evaluasi implementasi ICE Institute secara berkala. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pendampingan pada periode selanjutnya, seiring dengan arah kebijakan dan program unggulan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian terkait.



CAPAIAN KINERJA IKU 2.3

PERSENTASE PTS YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN ANTIINTOLERANSI, ANTIKEKERASAN SEKSUAL, ANTIPERUNDUNGAN, ANTINARKOBA, DAN ANTIKORUPSI

PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi merupakan PTS yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai antiintoleransi, antikekerasan seksual, anti-perundungan dan antikorupsi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XVI dengan catatan:

“Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI, PTS yang diperhitungkan dalam perhitungan indikator ini adalah PTS yang telah melakukan tindak lanjut dari sosialisasi misalnya pembentukan satgas, penyusunan kebijakan, SOP, dan lain-lain. “

Kriteria kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan PTS menerapkan:

1. Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek melalui platform Learning Management System, dan,
2. Paling sedikit (1) bentuk kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan lainnya. Kebijakan dimaksud dapat berbentuk :
 - Memasukkan materi tentang moderasi beragama atau kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa.
 - Memiliki satuan tugas PPKS sesuai dengan Permendikbudristek mengenai Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (Permendikburistek PPKS).
 - Memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh.
 - Memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus, dan atau
 - Memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpoloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Kriteria Kebijakan Antinarkoba :

PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti-narkoba sebagai berikut :

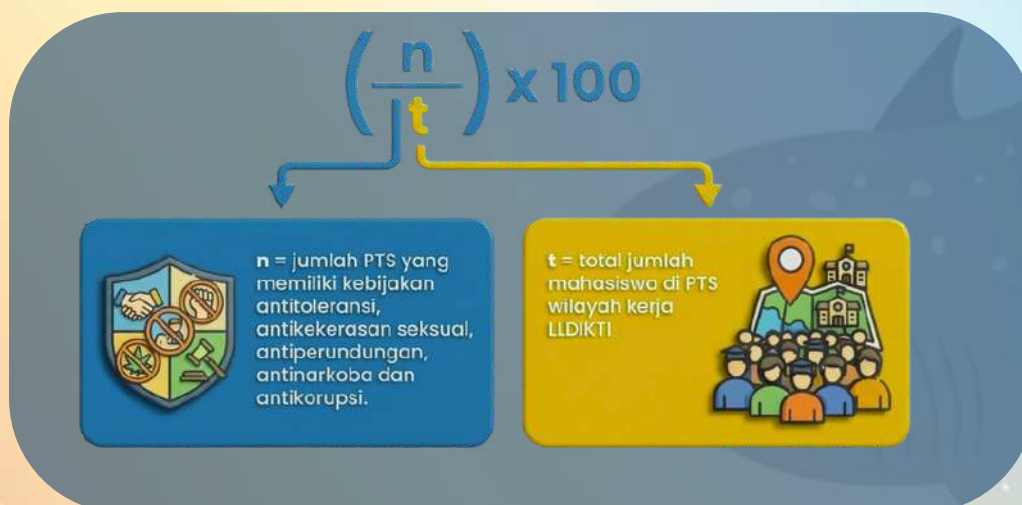
1. Memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan/atau,
 2. Melakukan sosialisasi anti-narkoba.
- Memasukkan materi tentang moderasi beragama atau kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa.
 - Memiliki satuan tugas PPKS sesuai dengan Permendikbudristek mengenai Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (Permendikburistek PPKS).
 - Memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh.
 - Memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus, dan atau
 - Memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpoloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Kriteria Kebijakan Antikorupsi

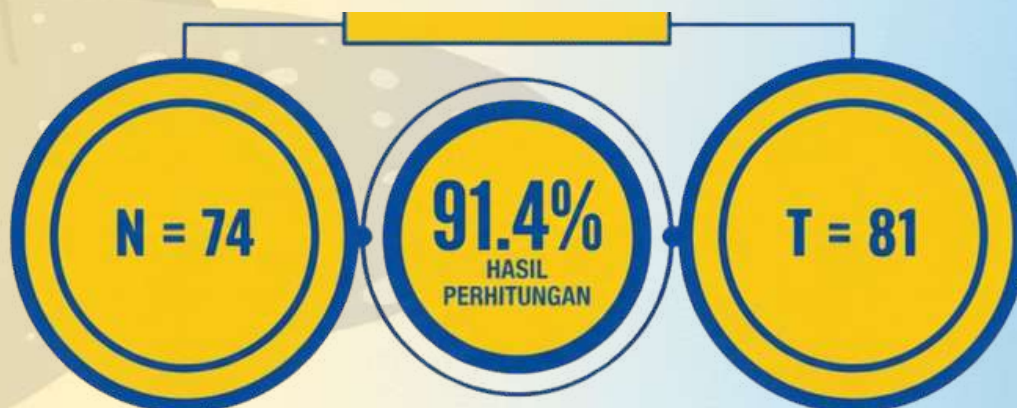
PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut :

- Menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi.
- Memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
- Mengimplementasikan Whistle Blowing System dan/atau
- Memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA



Adapun formula dan hasil perhitungan sebagai berikut :



TARGET DAN CAPAIAN IKU 2.3

Grafik disamping menunjukkan bahwa meskipun angka mutlak target belum tercapai (100% atau lebih), tingkat realisasi sebesar 96% umumnya dikategorikan sebagai kinerja yang sangat baik atau berhasil dalam banyak standar penilaian kinerja. LLDIKTI XVI telah berhasil memenuhi sebagian besar ekspektasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dengan hanya sedikit ruang (4%) yang perlu ditingkatkan untuk mencapai angka sempurna sesuai target.



Pada diagram disamping menjelaskan bahwa terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan adanya kendala atau tantangan spesifik di tahun 2025 yang menyebabkan performa tidak sebaik tahun sebelumnya. Mengingat adanya tren penurunan dari tahun 2024 dan tidak tercapainya target Renstra, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mencari penyebab turunnya 3 poin tersebut agar kinerja dapat kembali naik (rebound) di periode berikutnya.



Pada diagram disamping menjelaskan bahwa capaian tahun 2025 (91) berada sedikit di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra (95). Terdapat gap atau kekurangan sebesar 4 poin. Kinerja tahun 2025 sangat baik karena berhasil mendekati target strategis (Renstra) dengan tingkat keberhasilan di atas 95%, meskipun masih diperlukan evaluasi kecil untuk menutup selisih 4 poin agar target tercapai sepenuhnya (100%).

FAKTOR KEGAGALAN

1. Dalam pelaksanaan masih ditemukan keterlambatan pelaporan dari sebagian PTS terkait regulasi PPKPT yang telah disahkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tahapan penyusunan regulasi internal di masing-masing PTS serta keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan yang ditetapkan.
2. Selain itu, masih terdapat PTS yang berada pada tahap penyesuaian substansi regulasi internal agar selaras dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sehingga implementasi kebijakan PPKPT belum dapat dilaporkan secara optimal.



PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pendidikan Anti Korupsi sebagai bentuk penguatan nilai integritas serta pencegahan korupsi dan gratifikasi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI
2. Bimbingan Teknis Aplikasi SAHABAT untuk Koordinator dan Operator LLDIKTI
3. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

DOKUMENTASI PENDUKUNG



Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

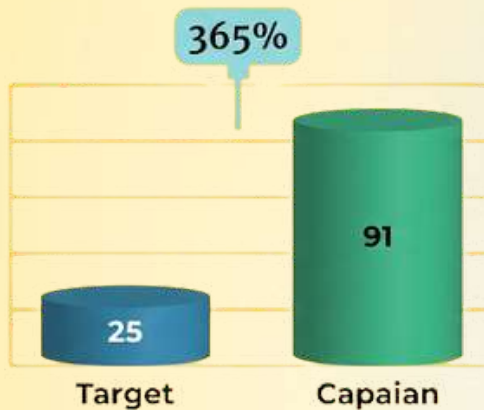
1. Belum optimalnya pendampingan dan monitoring dari Kementerian berdampak pada pelaksanaan kebijakan di lingkungan LLDIKTI yang belum maksimal
2. Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi belum dilaksanakan secara optimal kepada PTS, sehingga data PTS yang telah memperbarui SK sesuai ketentuan terbaru belum terpetakan secara akurat

LANGKAH ANTISIPATIF DAN STRATEGI

1. Sesi komitmen pimpinan PTS dalam mendukung implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan, antinarkoba, dan antikorupsi
 2. Percepatan pembentukan Satgas PPKPT di seluruh PTS di LLDIKTI XVI sesuai Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024
 3. Peningkatan kapasitas Satgas PPKPT di seluruh PTS yang telah memiliki satgas
 4. Monitoring dan Evaluasi Satgas PPKPT untuk memastikan pelaksanaan tugas satgas
 5. Memberikan rekomendasi ke Tim Kerja sama untuk melakukan MoU dengan BNN per wilayah sebagai bentuk pencegahan bahaya narkoba di Lingkungan PTS
 6. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut kerja sama antar PTS dan BNN
 7. Memberikan penguatan nilai-nilai integritas sebagai bentuk pencegahan tindakan korupsi dan gratifikasi di seluruh PTS lingkungan LLDIKTI XVI
- Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan terus mendorong PTS untuk segera menyampaikan laporan regulasi PPKPT yang telah disahkan, baik melalui surat resmi maupun sistem pelaporan yang ditetapkan. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan PTS juga akan dilakukan untuk memastikan percepatan penyusunan dan implementasi regulasi PPKPT.
 - Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan menyusun rekapitulasi data PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan PPKPT sebagai dasar pemantauan capaian IKU V serta bahan evaluasi dan pembinaan pada periode berikutnya.

ANALISA DAN PENGUKURAN KINERJA

SASARAN KINERJA 3 : MENINGKATNYA INOVASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN



IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus



IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan program studi yang bekerja sama dengan mitra

Sasaran Kinerja 3 khususnya pada IKU 3.1 menunjukkan kepatuhan PTS di wilayah ini sangat tinggi dalam aspek regulasi keamanan dan etika kampus, intinya mayoritas PTS (74 dari 81) sudah patuh terhadap regulasi pencegahan "dosa besar pendidikan" dan masalah integritas lainnya. .

Pada IKU 3.2, menunjukkan realisasi melampaui target dengan sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa mobilitas dosen di wilayah ini sangat aktif. Dosen tidak hanya mengajar di dalam kampus, tetapi sangat proaktif melakukan kegiatan tridharma di luar kampus. Kemungkinan faktor pendorongnya adalah kebijakan Kampus Merdeka yang mendorong dosen untuk mencari pengalaman industri atau kegiatan di luar prodi.



CAPAIAN KINERJA IKU 3.1

PERSENTASE PTS YANG BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH DOSEN YANG BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Yang dimaksud dengan kriteria dosen yang berkegiatan diluar kampus adalah;

Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:

- kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;
- format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
- kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus;
- Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

• **Kriteria Perguruan Tinggi:**

Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

• **Kriteria Kegiatan**

Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen.

Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
2. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
3. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

• Kriteria Pengalaman Praktisi

1. Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral; atau
 - lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.
2. Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:
 - menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
 - berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
 - menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.
 - Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA



Adapun formula dan hasil perhitungan sebagai berikut :



n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai kriteria minimal

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN



Grafik disamping menunjukkan bahwa Kinerja yang dicapai tidak hanya memenuhi target, tetapi melampauinya secara signifikan hingga lebih dari 3,5 kali lipat dari target awal. Grafik ini juga menunjukkan performa yang sangat positif (luar biasa) karena kinerja pada IKU 3.1 ini berhasil melampaui ekspektasi (Target PK) dengan margin yang sangat besar.

Grafik disamping menunjukkan terjadi kenaikan lebih dari 3,5 kali lipat (tepatnya 3,64 kali) dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan adanya perubahan strategi yang sangat efektif. Grafik ini juga menggambarkan kesuksesan besar dalam peningkatan kinerja.



Grafik disamping menunjukkan terjadi lonjakan kinerja yang sangat ekstrem. Kenaikan sebesar 66 poin merepresentasikan pertumbuhan sebesar 264% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bukan sekadar "perbaikan", melainkan "transformasi"

FAKTOR KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET

- Upaya peningkatan pelaporan dan validasi data dosen yang berkegiatan di luar kampus melalui sistem SISTER dan PDDIKTI terus dilakukan. Kegiatan difokuskan pada pendampingan teknis kepada PTS dan dosen terkait pemutakhiran data kegiatan tridarma di luar kampus, termasuk kegiatan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dengan industri, serta keterlibatan dalam kegiatan profesional lainnya.
- Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS mengenai pentingnya dosen berkegiatan di luar kampus sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja institusi dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama.

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Jurnal Terakreditasi Tahun 2025
2. Bimtek penulisan karya ilmiah lekor kepala dan guru besar di perguruan tinggi swasta Wilayah XVI
3. Pendampingan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025
4. Pelatihan penyusunan RAB penelitian dan PKM 2025
5. Pendampingan program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat batch 1 tahun anggaran 2025
6. Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
7. Workshop Peningkatan Pemerolehan, Perlindungan, Pemanfaatan HKI dan Paten pada Perguruan Tinggi



DOKUMENTASI PENDUKUNG

Bimtek penulisan karya ilmiah Lektor Kepala dan Guru Besar di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XVI



Pendampingan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025



HAMBATAN DAN MASALAH

Salah satu permasalahan utama dalam peningkatan pelaporan dosen yang berkegiatan di luar kampus adalah belum optimalnya sistem pelaporan pada SISTER dan PDDIKTI yang bersifat parsial, belum terintegrasi, serta belum sepenuhnya ter-update secara berkala. Data kegiatan dosen di luar kampus, seperti penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dengan industri, dan aktivitas profesional lainnya, masih tersebar pada berbagai sistem internal PTS dan belum seluruhnya tersinkronisasi dengan sistem nasional. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembaruan data, inkonsistensi informasi, serta kesulitan dalam proses validasi dan rekapitulasi capaian IKU secara akurat.

Selain itu, perubahan arah kebijakan nasional yang semula berfokus pada implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dan saat ini bergeser menuju paradigma Kampus Berdampak menimbulkan tantangan adaptasi bagi PTS dan dosen. Sebagian perguruan tinggi masih dalam tahap penyesuaian terhadap indikator, bentuk kegiatan, dan mekanisme pelaporan yang relevan dengan kebijakan baru tersebut. Perubahan fokus kebijakan ini berdampak pada belum seragamnya pemahaman PTS dalam mengaitkan kegiatan dosen di luar kampus dengan capaian dampak nyata serta pelaporan yang sesuai dengan indikator kinerja yang berlaku.



LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

1. Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan melakukan penguatan dan pembenahan sistem pelaporan kegiatan dosen di luar kampus melalui optimalisasi pemanfaatan SISTER dan PDDIKTI, termasuk mendorong pembaruan data secara berkala dan peningkatan integrasi data antara sistem internal PTS dan sistem nasional. Pendampingan teknis akan difokuskan pada standarisasi pengisian data, peningkatan pemahaman teknis operator dan dosen, serta validasi data agar pelaporan lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan melaksanakan sosialisasi dan penyamaan persepsi kebijakan kepada Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS terkait pergeseran fokus dari MBKM menuju Kampus Berdampak, khususnya dalam konteks kegiatan dosen di luar kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dosen tidak hanya terlapor secara administratif, tetapi juga selaras dengan orientasi dampak bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
3. Hasil penguatan sistem pelaporan dan monitoring tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi capaian IKU, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta perumusan strategi pendampingan lanjutan bagi PTS, sejalan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi dan penguatan peran dosen dalam mewujudkan Kampus Berdampak.



CAPAIAN KINERJA IKU 3.2

PERSENTASE PTS YANG BERHASIL MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH PROGRAM STUDI YANG BEKERJA SAMA DENGAN MITRA

Yang dimaksud dengan kriteria kerja sama program studi dengan mitra adalah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.

- **Kriteria Kemitraan**

Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:

Untuk PTN Akademik:

- Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.
- Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

Untuk PTN Vokasi:

- Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- Menyediakan kesempatan kerja; dan
- Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.

Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

Untuk PTN Seni Budaya:

- Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

Kriteria Mitra:

- Perusahaan multinasional;
- Perusahaan nasional berstandar tinggi;
- Perusahaan teknologi global;
- Perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- Organisasi nirlaba kelas dunia;
- Institusi/organisasi multilateral;
- Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);
- Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
- Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;
- Rumah sakit; atau
- UMKM.

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA





Diagram disamping ini menunjukkan, bahwa Kinerja pada tahun 2025 dinilai sangat baik karena tidak hanya memenuhi target yang direncanakan dalam strategi jangka panjang (Renstra), tetapi juga berhasil melampauinya, meskipun dengan margin yang tipis (surplus 1 poin).

FAKTOR KEBERHASILAN TARGET DAN CAPAIAN



- Dukungan penuh Pimpinan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencapaian target indikator Kinerja baik dari segi formil maupun materil, yang diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian hasil yang maksimal pelaporan, serta meningkatkan ketepatan waktu penginputan data.
- omitmen bersama mitra yang terjalin secara baik dan intens dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Fasilitasi Kerja Sama ke Perguruan Tinggi Swasta Unggul di LLDIKTI Wilayah V
2. LLDIKTI Wilayah XVI telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui Aplikasi Laporkerma. LLDIKTI juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Operator Laporkerma yang ada di Perguruan Tinggi Swasta
3. Penandatanganan Kerja sama antara LLDIKTI XVI dengan Internasional Test Center
4. Penandatanganan Kerja sama antara LLDIKTI XVI dengan Koperasi Modern Teknologi Nusantara (KOMETA)

DOKUMENTASI PENDUKUNG



HAMBATAN DAN MASALAH

1. Tingkat kepatuhan pelaporan yang bervariasi antar PTS
2. Tidak semua PTS melaporkan kerja samanya secara tepat waktu melalui Aplikasi Laporkerma, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemantauan dan evaluasi oleh LLDIKTI Wilayah XVI.
3. Kendala teknis penggunaan aplikasi
4. Beberapa operator PTS masih mengalami kendala teknis dalam penggunaan Aplikasi Laporkerma, seperti kesalahan input sistem yang berdampak pada presentase Prodi bekerjasama dengan Mitra setiap PTS
5. Keterbatasan koordinasi internal di PTS
6. Dalam beberapa kasus, koordinasi antara Operator Laporkerma dengan prodi di PTS belum berjalan optimal, sehingga data kerja sama yang ada di prodi tersimpan di Prodi dan tidak di teruskan ke Operator Laporkerma untuk di unggah pada aplikasi Laporkerma sehingga tidak seluruh aktivitas kerja sama yang dapat di laporkan.
7. Keterbatasan Anggaran dalam fasilitasi kerja sama
8. Komitmen dari mitra ataupun perguruan tinggi seringkali tidak berkelanjutan dan sangat tergantung pada perubahan kebijakan internal sehingga sulit untuk menindaklanjuti kerja sama.



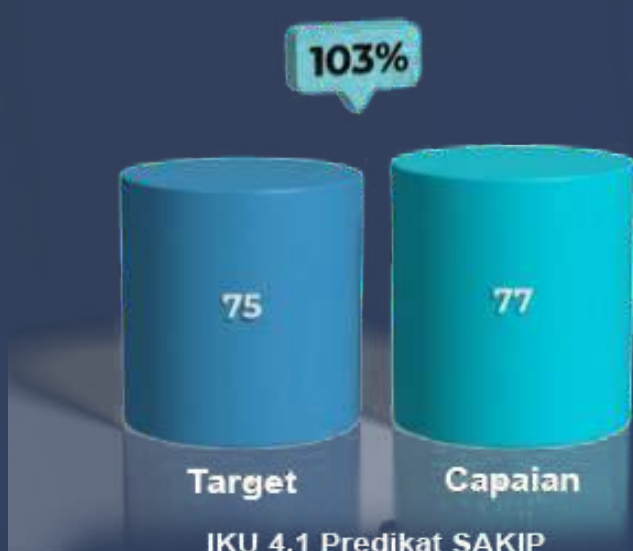
LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

1. Memastikan alokasi dana tidak hanya bersifat tahunan tetapi juga berkelanjutan
2. Mendorong PTS untuk beralih dari MoU ke MoA dengan kontrak yang jelas dan mengikat serta mencakup indikator keberhasilan bagi kedua belah pihak
3. LLDIKTI berperan aktif melakukan analisis tren kebutuhan industri serta melakukan Link & Match yang proaktif dengan PTS.
4. Terus melakukan komunikasi yang aktif dengan Perguruan Tinggi dalam hal kepatuhan pelaporan data kerja sama.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kerja sama, termasuk penilaian jumlah dan kualitas program studi yang telah mengimplementasikan kerja sama dengan mitra, sebagai dasar perbaikan dan pengembangan model kolaborasi pada periode selanjutnya.



ANALISA DAN PENGUKURAN KINERJA

SASARAN KINERJA 4: MENINGKATNYA TATA KELOLA LLDIKTI



Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.1
2	Pengukuran Kinerja	30%	24
3	Pelaporan Kinerja	15%	11.1
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19.25
Predikat		BB	77.45

Sumber Data : aplikasi SPEKTA

Capaian Kinerja IKU 4.1.
Predikat SAKIP Tahun 2025



Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu

Capaian Kinerja IKU 4.2. Nilai
Kinerja Anggaran atas
pelaksanaan RKAKL Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA IKU 4.1

PREDIKAT SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, yang mengharuskan unit kerja menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai, dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (outcome). Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan.

SAKIP terdiri dari empat aspek utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.

terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematisasi Laporan Kinerja, Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja, Mekanisme Reviu Laporan Kinerja, Pelaporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.



terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja.

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Metode Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan Penilaian.

Penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja

- Sub Komponen : Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia (6%)
- Sub Komponen : Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)
- Sub Komponen : Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)

Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)
- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
- Secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%)
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
- Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)

Predikat penilaian SAKIP



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pelaporan Kinerja

- Sub Komponen: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%)
- Sub Komponen: Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%)
- Sub Komponen: Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)

- Sub Komponen : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)
- Sub Komponen : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%)
- Sub Komponen : Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)



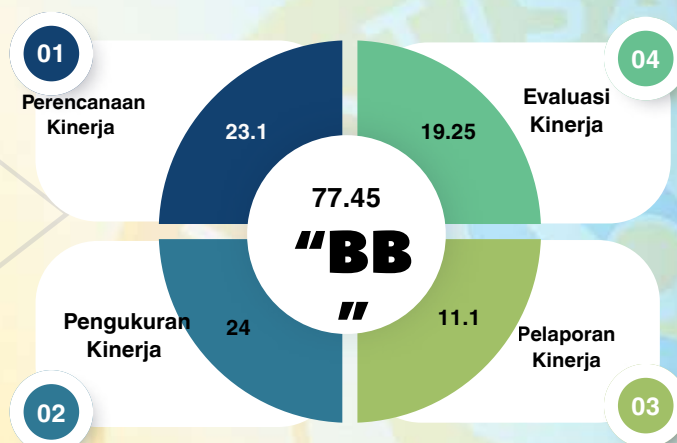


**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun 2025**

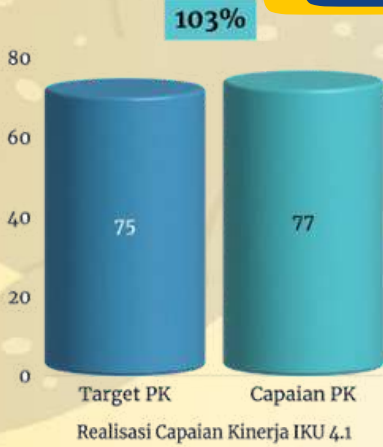
No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.1
2	Pengukuran Kinerja	30%	24
3	Pelaporan Kinerja	15%	11.1
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19.25
Predikat		BB	77.45

Hasil predikat SAKIP ditetapkan pada akhir periode Kinerja yang diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiksbaintek. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah XVI telah mencapai target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu predikat BB (SANGAT BAIK) dengan nilai **77.45**. Capaian ini apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu BB (75) dapat dikatakan sudah berhasil dengan tingkat capaian **103%**. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian ini telah mencapai target dari Renstra 2025 yaitu BB. Meskipun target akhir Renstra telah tercapai, LLDIKTI Wilayah XVI tetap berusaha untuk meningkatkan nilai SAKIP dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2025 dan melakukan beberapa perbaikan dari sistem yang telah berjalan.

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian dengan persentase masing-masing variabel sebagai berikut :



PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN

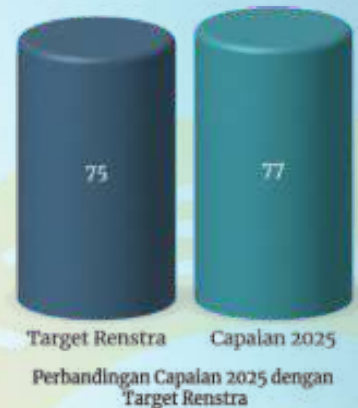


Grafik disamping menunjukkan kinerja untuk IKU 4.1 dinilai sangat baik (berhasil). Indikator ini menunjukkan status "Melampaui Target" dengan surplus kinerja sebesar 2 poin atau setara dengan kelebihan 3% di atas target yang ditetapkan.



Grafik disamping menunjukkan adanya kenaikan capaian dari tahun 2024 ke tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan atau pertumbuhan kinerja. Grafik tersebut menggambarkan performa yang membaik secara konsisten dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang positif.

Grafik ini menunjukkan kinerja pada tahun 2025 dinilai sangat baik/sukses karena realisasi tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 2,67%.



Adapun sumber data capaian indikator ini adalah :

Capaian Predikat SAKIP ditetapkan dari Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XVI dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk tahun kinerja yang diukur





Perkembangan Capaian Predikat SAKIP

FAKTOR KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET



Faktor tercapainya target pada indikator SAKIP dikarenakan komitmen dan peran aktif dari pimpinan yang didukung seluruh pegawai LLDIKTI XVI dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang baik

PROGRAM DAN KEGIATAN

- Penyusunan SKP Pegawai 2024 dan Sasaran SKP 2025
 - Penyusunan LHKPN dan Pelaporan Pajak Tahunan.
- Rapat Kerja Tahun 2025
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025
- Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan 2025
 - Finalisasi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2026
- Rapat Evaluasi SAKIP 2025
 - Penilaian Mandiri SAKIP 2025.
- Breafing Awal Bulan Secara Berkala.
 - Reward dan punishment
- Rapat Penyusunan Renstra
 - Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 2025

DOKUMENTASI PENDUKUNG



HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. Penyusunan SKP tidak Tepat waktu dan Sasaran SKP belum disusun secara cascading
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja.
3. Proses bisnis yang belum terstandarisasi.
4. Integrasi sistem yang belum optimal sejak perencanaan kinerja sampai pengumpulan dan evaluasi kinerja.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
6. Kurangnya kesadaran dari seluruh pegawai akan pentingnya SAKIP

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. Penerapan penyusunan SKP berbasis cascading secara sistematis, dimulai dari Perjanjian Kinerja pimpinan hingga ke SKP individu pegawai. Proses ini diperkuat melalui pendampingan teknis oleh tim perencanaan dan kepegawaian serta pemanfaatan aplikasi e-kinerja untuk memastikan keterkaitan tujuan, indikator, dan target kinerja antar level.
2. Penguatan sistem pengumpulan data kinerja berbasis digital secara bertahap dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia secara nasional maupun internal. Optimalisasi sumber daya yang ada dilakukan melalui integrasi sederhana terlebih dahulu, disertai peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data berbasis teknologi informasi.
3. Penyusunan dan penetapan standar proses bisnis serta SOP yang selaras dengan siklus SAKIP. Standarisasi ini disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Penguatan integrasi sistem kinerja secara bertahap dengan memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan (Renstra, RKT), penganggaran, perjanjian kinerja, hingga laporan kinerja. Integrasi ini difokuskan pada keselarasan indikator, target, dan realisasi kinerja sebagai satu siklus yang utuh.
5. Penguatan integrasi sistem kinerja secara bertahap dengan memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan (Renstra, RKT), penganggaran, perjanjian kinerja, hingga laporan kinerja. Integrasi ini difokuskan pada keselarasan indikator, target, dan realisasi kinerja sebagai satu siklus yang utuh.

CAPAIAN KINERJA IKU 4.2

NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKAKL

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu institusi dalam periode tertentu. NKA digunakan untuk menilai perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya.

Untuk mengukur kinerja anggaran, digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi : Kesesuaian terhadap peren-canaan, Efektivitas pelaksanaan anggaran, Efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator IKPA



Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran



FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA



Adapun sumber data capaian kinerja indikator ini adalah :

Nilai IKPA dari OMSPAN (<https://spanit.kemenkeu.go.id>)
Nilai EKA dari SMART (<https://smart.kemenkeu.go.id>)
yang dirangkum dalam Spekta.Kemendktisaintek.go.id pada akhir tahun anggaran

HASIL PERHITUNGAN KINERJA IKU 4.2



Tingkat Ketercapaian
110%



Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu



FAKTOR KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET



- Komitmen pimpinan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran
- Partisipasi seluruh pegawai dalam penerapan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pegawai yang kompeten
- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pengelola keuangan dan tim kerja
- Koordinasi yang baik dengan KPPN, DJKN, KPKNL

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

1. Melakukan penyesuaian kembali anggaran dan RPD sesuai perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran
2. Menyusun rencana cadangan kegiatan.
3. Monitoring realisasi anggaran dan output secara berkala.

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Konsultasi dan koordinasi dengan DJPb dan KPPN
2. Revisi dan pemutakhiran RPD setiap triwulan
3. Penyesuaian pagu berdasarkan usulan dan data pendukung (TOR, RAB, dll.)
4. Monitoring dan mengupdate realisasi anggaran secara berkala (mingguan)
5. Evaluasi capaian output secara berkala
6. Penyusunan laporan keuangan triwulanan
7. Reviu internal laporan keuangan sebelum dikirim ke KPPN dan Eselon I
8. One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulanan
9. Kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik KPPN Tahun 2025 dan Press Conference APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Agustus 2025
10. Melakukan likuidasi kewajiban dan aset
11. Konsultasi dan koordinasi terkait anomali pembayaran gaji dan ketidaksesuaian data supplier
12. One On One Meeting Percepatan Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2025
13. Melaksanakan FGD Pengelolaan BMN
14. Melaksanakan konsultasi terkait pembayaran pajak melalui aplikasi Coretax pada Kantor Pelayanan Pajak

DOKUMENTASI PENDUKUNG



HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

1. Perubahan rencana dan jadwal kegiatan yang berdampak pada RPD dan pelaksanaan anggaran
2. RAB Kegiatan belum disusun secara rinci sehingga memerlukan penyesuaian pada saat pelaksanaan

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

1. Melakukan penyesuaian kembali anggaran dan RPD sesuai perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran
2. Menyusun rencana cadangan kegiatan.
3. Monitoring realisasi anggaran dan output secara berkala.



B. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN



Pagu anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp.82.484.640.000,- dan terdapat dana blokir sebesar Rp. 2.939.640.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 78.132.840.902.000,- dengan persentase daya serap sebesar 98.22%. Dengan realisasi ini menunjukkan LLDIKTI XVI ini sangat produktif dalam menggunakan anggarannya sesuai rencana. Hanya 1,7% anggaran yang tersisa, yang berarti pemborosan anggaran atau dana mengendap (SILPA) sangat minim.



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	75.223.331.000	4.21.915.000	0	79.545.246.000
Realisasi	73.812.619.987	4.320.220.915	0	78.132.840.902
Persentase	98	100	0	99.22
Sisa	1.410.711.013	1.694.085	0	1.412.405.098

Alokasi dan Realisasi Anggaran mendukung Capaian Kinerja IKU Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran Pendukung
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	356.244.000
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	189.426.000
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	110.910.000
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	110.000.000
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	30.000.000
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	5.600.000
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	99.312.000
4	(S.4) Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	(IKU.4.1) Predikat SAKIP	30.000.00
		4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	25.000.000



2. EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XVI telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 173.500.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang semula dilaksanakan secara luring dialihkan ke daring serta perubahan strategi pelaksanaan kegiatan.



Anggaran hasil efisiensi dimaksud digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian target IKU pada perjanjian kinerja antara lain :

1. FGD Pengelolaan BMN pasca likuidasi
2. Artificial Intelligence Applications in Research and Manuscript Development
3. Berbagi Praktik Baik Sesi 1 : Kemahasiswaan
4. Webinar Manajemen Perubahan (6 Sesi)
5. Workshop Penyusunan SKP
6. Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis
7. Workshop Layanan ISBN
8. Workshop Pengembangan Karir ASN
9. Webinar Pengelolaan Kearsipan
10. Pelatihan Coaching dan Mentoring bagi Pimpinan dan Ketua Tim
11. Optimalisasi AI dalam Mendukung dan Meningkatkan Kinerja ASN



INOVASI

-

Tampilan Dasbor LLDikti Wilayah XVI

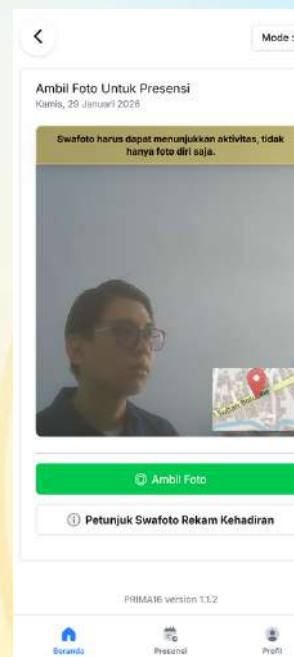
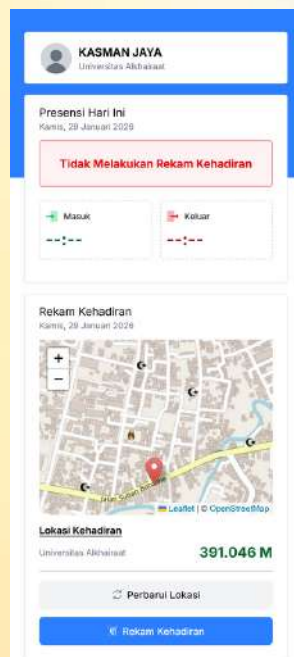
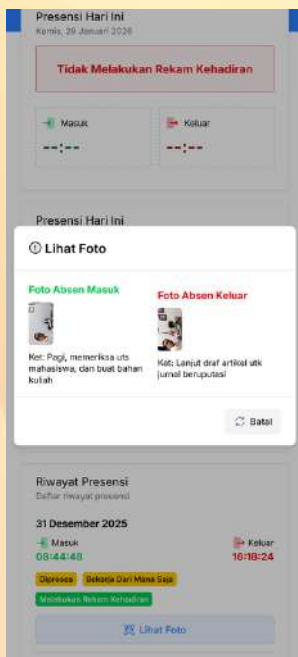
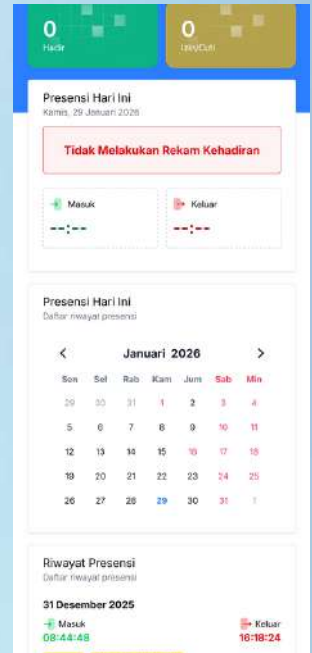
Inovasi Aplikasi PRIMA16

PRIMA16 merupakan aplikasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan LLDIKTI XVI. Saat ini, aplikasi telah dilengkapi dengan modul presensi khusus untuk dosen dengan penugasan khusus (DPK).

Sebelum menggunakan aplikasi PRIMA16, presensi dosen DPK dilakukan secara manual melalui dokumen absensi yang ditandatangani. Metode konvensional ini memiliki kelemahan karena tidak dapat membuktikan bahwa dosen benar-benar melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan hadirnya aplikasi PRIMA16, setiap presensi kini dilengkapi dengan bukti foto kehadiran beserta catatan kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Selain bukti foto, aplikasi juga merekam lokasi saat dosen DPK melakukan presensi. Melalui fitur pelacakan lokasi ini, dapat diketahui apakah presensi dilakukan di lokasi tugas yang seharusnya atau di luar lokasi tersebut. Dengan demikian, fitur ini memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dijalankan oleh setiap dosen DPK.

Selain itu, data presensi yang tercatat dalam aplikasi PRIMA16 juga digunakan sebagai dasar pembayaran uang makan bagi dosen DPK.



Dalam rangka mengoptimalkan distribusi informasi dari LLDIKTI Wilayah XVI kepada pemangku kepentingan utama, yaitu perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa, maka LLDIKTI XVI mengoptimalkan pemanfaatan media sosial yakni

1. Whatsapp Channel : <https://whatsapp.com/channel/0029Vaxou4dKrWQzNrZTsn0H>
2. Youtube Channel : <https://youtube.com/@lldiktiwilayah16?si=A7p-Ja2HseBy7r4c>
3. Instagram : <https://www.instagram.com/lldiktiwil16/>
4. Tiktok : https://www.tiktok.com/@lldiktiwil16?_r=1&_t=ZS-93Nl9eT7EIR
5. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61581527911976&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

Media sosial tersebut dapat digunakan pula sebagai wadah interaksi antara pemangku kepentingan dengan LLDIKTI Wilayah XVI. Dukungan Bapak/Ibu dengan mengikuti media sosial yang kami kelola sangat berarti dalam upaya kami untuk memberikan konten dan informasi yang berkualitas secara berkelanjutan.



PENGHARGAAN

Tahun 2025, LLDIKTI Wil. XVI mendapat 2 penghargaan dari KPPN Gorontalo yakni :



PROGRAM CROSSCUTTING/KOLABORATIVE

PROGRAM KERJASAMA KOMETA





BAB. IV

PENUTUP

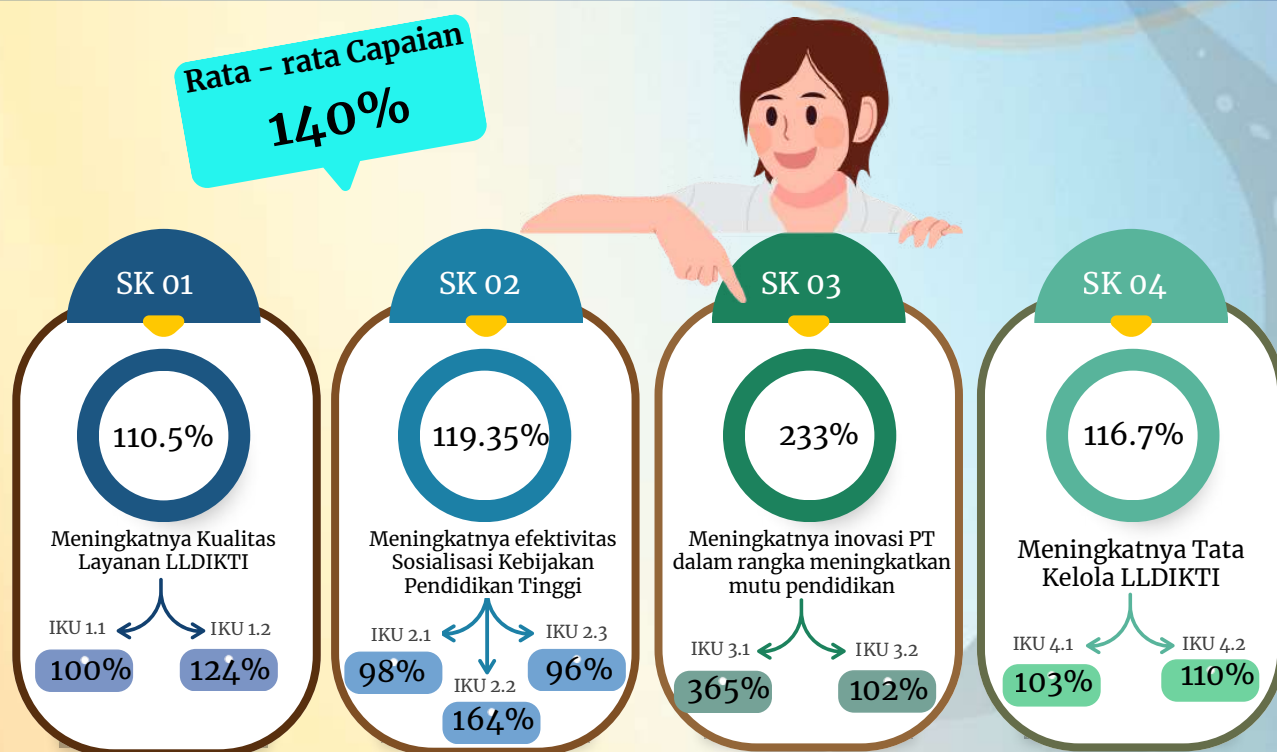


CAPAIAN KINERJA 2025

Secara umum, LLDIKTI Wilayah XVI telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 140%. Secara keseluruhan dari 9 target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk 3 sasaran dinyatakan berhasil atau melebihi target kinerja dan 1 sasaran tidak mencapai target. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp.78.132.840.902,- atau 98.22% dari total pagu anggaran 2025 dengan angka efisiensi yang berhasil dilakukan sebesar Rp. 173.500.000,- atau 4% dari pagu belanja barang.

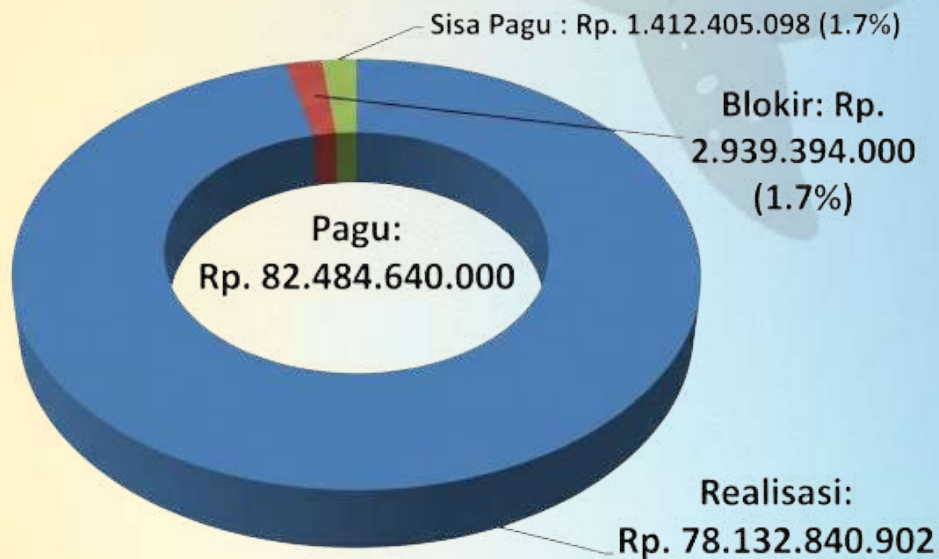
Kendala yang secara umum dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah keterbatasan kemampuan perguruan tinggi swasta dalam memenuhi kriteria sesuai peraturan.



KINERJA KEUANGAN 2025



Capaian Realisasi Anggaran



Pagu anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp.82.484.640.000,- dan terdapat dana blokir sebesar Rp. 2.939.640.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 78.132.840.902.000,- dengan persentase daya serap sebesar 98.22%. Dengan realisasi ini menunjukkan LLDIKTI XVI ini sangat produktif dalam menggunakan anggarannya sesuai rencana. Hanya 1,7% anggaran yang tersisa, yang berarti pemborosan anggaran atau dana mengendap (SILPA) sangat minim.





REKOMENDASI PERBAIKAN

IKU 1.1

- LLDIKTI Wilayah XVI sedang berada dalam fase transformasi pelayanan untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU 1 (Kualitas Pelayanan/Kepuasan Pengguna). Kedepannya lakukan uji petik diam-diam (pura-pura menjadi pengguna layanan) untuk cek konsistensi pelayanan antar unit secara objektif, serta memastikan hasil monitoring dibahas mingguan/bulanan (bukan tahunan) agar perbaikan bisa langsung dieksekusi.

Merubah strategi pendekatan dari sosialisasi ke simulasi, misalkan dengan melaksanakan Klinik "Bedah Borang": Hentikan sosialisasi umum. Ganti dengan pendampingan teknis bedah draf LED & DKPS secara langsung per klaster prodi. Melakukan kegiatan Bulan Bersih Data dengan mewajibkan sinkronisasi PDDikti 100% sebelum pendampingan, karena SAPTO berbasis data kuantitatif., Serta menerapkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning): Kirim notifikasi otomatis "Lampu Merah" ke PTS yang masa akreditasinya tersisa 1 tahun, disertai tenggat waktu penyusunan dokumen.

IKU 1.2

IKU 2.1

Optimalisasi Pelaporan IKU 3 (Tata Kelola Data), dengan melaksanakan klinik data berkala dengan cara melakukan validasi data per triwulan, bukan di akhir tahun. Ini memudahkan koreksi jika ada data yang tidak valid (anomali), bersiap untuk transisi Menuju "Kampus Berdampak" (Substansi), focus pada "Luaran" (Outcome), pemetaan permasalahan daerah (Sulut, Sulteng, Gorontalo) dan menghubungkannya dengan PTS. Arahkan "Kampus Berdampak" untuk menyelesaikan isu lokal (misal: stunting, pariwisata bahari, pertanian).

Pameran "Best Practice": Adakan forum berbagi di mana PTS yang sukses menerapkan "Kampus Berdampak" mempresentasikan model kerjasamanya, bukan sekadar teori.

IKU 2.2

LLDIKTI Wilayah XVI akan mendorong pegawai untuk melakukan pendampingan teknis bertahap bagi PTS melalui lokakarya lanjutan rekognisi kredit, penguatan pengelolaan konten digital dan pembelajaran daring, serta pemetaan kesiapan infrastruktur/SDM dan monitoring–evaluasi berkala sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pendampingan periode berikutnya.

Tetapkan pendampingan terarah dan sosialisasi intensif mekanisme pelaporan PPKPT (template/SOP, klinik regulasi, dan helpdesk), disertai penjadwalan tenggat bertahap serta monitoring–evaluasi berkala untuk memastikan regulasi internal PTS segera selaras dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan pelaporan tepat waktu.

IKU 2.2**IKU 3.1**

Strategi ke depan adalah menetapkan tata kelola pelaporan satu pintu di tingkat PTS melalui penunjukan PIC lintas unit (akademik–SDM–LPPM–TI), penyusunan SOP dan template/kamus data baku beserta standar bukti kegiatan agar data kegiatan dosen luar kampus terkumpul rapi dalam satu repositori/dasbor internal yang kemudian disinkronkan secara berkala ke SISTER dan PDDIKTI, disertai program pembersihan dan rekonsiliasi data secara rutin untuk mengurangi inkonsistensi, penguatan pelatihan teknis dan klinik pelaporan (helpdesk) untuk mempercepat validasi, serta penyusunan matriks konversi kegiatan dosen ke indikator “Kampus Berdampak” agar pemahaman dan mekanisme pelaporan seragam; seluruhnya diperkuat dengan penetapan KPI dan tenggat triwulan serta skema insentif–konsekuensi guna memastikan pembaruan data tepat waktu dan capaian kinerja dapat direkap secara akurat.



Melakukan klasterisasi kesiapan PTS/prodi disertai pemetaan gap SDM, infrastruktur, dan pendanaan, lalu menerapkan pendampingan terarah melalui “shared services” (template dokumen kerja sama, SOP, helpdesk, dan pelatihan) serta penunjukan PIC tetap dan program training of trainers agar kapasitas merata; pada saat yang sama, dorong implementasi kerja sama bertahap dengan prioritas program berdampak namun berbiaya rendah sebagai quick wins, diversifikasi sumber pendanaan melalui skema cost-sharing/matching fund dan akses hibah/CSR/kemitraan industri, serta perkuat monitoring-evaluasi berkala berbasis KPI agar implementasi kerja sama lebih konsisten dan merata di seluruh program studi.

IKU 3.2**IKU 4.1**

Melakukan pendekatan ke masing-masing tim kerja agar pegawai dalam timnya dapat menyusun komitmen kinerja. Serta mengkoordinasikan dengan seluruh ASN untuk penyusunan Evaluasi SKP dan Rencana SKP 2025.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian yang tinggi sekaligus meminimalkan deviasi pada periode berikutnya, LLDIKTI Wilayah XVI akan mengintensifkan koordinasi secara berkelanjutan, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal, termasuk Kanwil DJPb dan KPPN, guna memastikan seluruh parameter. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan melaksanakan reviu serta monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk melakukan penjadwalan ulang maupun penyesuaian langkah kerja apabila diperlukan, agar pelaksanaan tetap selaras dengan rencana. Di saat yang sama, langkah mitigasi dan tindakan korektif akan disiapkan lebih dini apabila teridentifikasi potensi keterlambatan, deviasi, atau kendala administrasi, sehingga dampaknya terhadap pelaksanaan anggaran dapat ditekan dan capaian kinerja tetap terjaga pada level sangat baik.

IKU 4.2



LAMPIRAN





Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munawir Sadzali Razak
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Gorontalo, 20 Mei 2025

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XVI

Munawir Sadzali Razak
NIP 198206102006041001

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8
	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTN lain	78
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9
	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63
	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2
[S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25
	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14
[S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTl)	[4.1] Predikat SAKIP	BB
	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 58.784.863.000
2.	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 16.578.166.000
Total Anggaran			Rp. 75.363.029.000

Gorontalo, 20 Mei 2025

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Khairul Munadi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XVI



Munawir Sadzali Razak



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munawir Sadzali Razak
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Gorontalo , 3 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	99.8
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	78
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	61.9
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	2.63
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	95.2
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	25
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	57.14
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7733	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp57.530.863.000
2	7735	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp24.953.777.000
Total Anggaran			Rp82.484.640.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi

Gorontalo , 3 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Lembaga Layanan
 Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
 Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Sebagai lembaga yang menjadikan pelayanan sebagai tugas utama, LLDIKTI Wilayah XVI terus mengupayakan peningkatan kualitas. Diantaranya adalah :

1. Tindak lanjut survey kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Pengembangan aplikasi dasbor LLDIKTI wilayah XVI sebagai terobosan dalam visualisasi dan pengelolaan data pendidikan tinggi untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
3. peningkatan layanan helpdesk dengan fitur pelacakanajuan atau tracking yang dapat memantau status layanan SIPINTER secara real-time.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah XVI adalah kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kurangnya anggaran untuk ketersediaan infrastruktur server yang dikarenakan regulasi yang melarang pengadaan server mandiri di satuan kerja. Selain itu, penggunaan server Kominfo juga memiliki banyak keterbatasan dari segi birokrasi sehingga membutuhkan lebih lama untuk menyelesaikan satu aplikasi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menambah SDM yang berkompeten dibidang SPBE, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pelayanan. Selain itu parameter penilaian untuk Tingkat kepuasan pengguna akan dibuat lebih terperinci.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang mempengaruhi proses akreditasi serta melakukan pemantauan dan pendataan pada Perguruan Tinggi yang sudah habis atau mendekati masa kadaluwarsa akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi.

Dalam hal peningkatan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain, LLDIKTI Wilayah XVI terus memantau progress penyelesaian penyatuan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan sosial Manado.

Kendala/Permasalahan

Proses Akreditasi perguruan tinggi yang cukup lama salah satunya dikarenakan oleh migrasi Akun Sapto dari 1.0 menjadi Sapto 2.0 yang kurang tersosialisasi ke PTS. Selain itu kendala lain adalah terbatasnya komunikasi antara perguruan tinggi pengusul dengan BAN- PT atau LAM.

Sedangkan untuk penyatuan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado masih terkendala pada aspek hukum.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan kegiatan workshop strategi peningkatan peringkat akreditasi bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI. dan terus melakukan pemantauan terkait status akreditasi PT.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Pada periode Triwulan I ini, LLDIKTI XVI berfokus pada pemantauan laporan pelaksanaan IKU PTS, sebagai alat ukur pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain laporan pelaksanaan IKU PTS, LLDIKTI Wilayah XVI juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran diluar program studi diantaranya Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring.

Kendala/Permasalahan

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Untuk pelaksanaan workshop optimalisasi penggunaan teknologi pembelajaran daring (LMS) terdapat kendala diantaranya : keterbatasan kompetensi dan literasi digital para dosen, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan institusi dan Yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendiktisaintek.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Pada periode Triwulan I ini, LLDIKTI XVI berfokus pada pemantauan laporan pelaksanaan IKU PTS, sebagai alat ukur pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain laporan pelaksanaan IKU PTS, LLDIKTI Wilayah XVI juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran diluar program studi diantaranya Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring.

Kendala/Permasalahan

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Mengintegrasikan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendiknas.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Adanya perubahan dari PPKS menjadi PPKPT dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang menggantikan Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPKS yang fokus hanya pada kekerasan seksual. Untuk itu LLDIKTI Wilayah XVI terus mengimbau PTS untuk melakukan pembaruan Satuan Tugas (Satgas) agar pengawasan akan lebih efektif.

Kendala/Permasalahan

Saat ini LLDIKTI XVI belum mendapatkan pelaporan terkait jumlah PTS yang sudah membuat regulasi PT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong PTS untuk melaporkan regulasi PPKPT yang sudah disahkan di PTSnya masing-masing.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Untuk peningkatan persentase jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran data dosen pada SISTER dan PDDIKTI. Kompetensi dosen dalam Peningkatan kinerja melalui kegiatan di luar kampus juga didukung dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya , Sosialisasi Perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Dosen dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan kebutuhan dosen dalam mendukung proses akademik dan pengembangan institusi pendidikan tinggi.

Kendala/Permasalahan

Pelaporan kegiatan dosen yang berkegiatan diluar kampus hanya dilaporkan melalui SISTER, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan pelaporan data dosen.

Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi jabatan fungsional dosen, adalah kurangnya pemahaman dosen mengenai proses pengajuan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendiknas Nomor 65 Tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengajak Pimpinan PTS untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data dosen dapat terlaksana secara



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

berkala.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Di Triwulan I ini, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA

Kendala/Permasalahan

Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk strategi kedepan, LLDIKTI XVI akan melaksanakan bimbingan teknis Peningkatan pelaporan Kerjasama PT pada Laporkerma, serta penguatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yakni pengumpulan pelaporan pajak SPT Tahunan, penyusunan SKP 2024 dan rencana SKP 2025 ASN LLDIKTI, serta melaksanakan FGD terkait program prioritas tahun 2026

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi adalah dalam perencanaan kinerja masih terkendala dengan belum terbitnya Renstra Kemdiktisaintek sehingga LLDIKTI XVI juga belum dapat menyusun Renstra yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja serta penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan perencanaan kinerja tahun 2025 dengan mengacu pada Kepmendikbud No. 210 sebagai dasar perencanaan kinerja

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pada tahun 2025, pasca diberlakukan efisiensi, maka beberapa hal yang telah dilakukan yakni :

1. Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran kegiatan
2. Menyusun strategi pencapaian output
3. Melakukan penyesuaian RAB, RPD dan penjadwalan ulang kegiatan
4. Menyiapkan dokumen pendukung untuk percepatan pelaksanaan anggaran

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi pasca efisiensi yakni penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaannya ke triwulan II dan III, hal ini menyebabkan target realisasi anggaran yang sudah di petakan pada RPD tidak tercapai.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan penyerapan anggaran pada triwulan II serta mengubah strategi pelaksanaan kegiatan dari luring ke daring,

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	18	69	Rp4.515.149.000	Rp1.453.378.085	32.19
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	5	17	Rp43.650.000	Rp16.172.880	37.05
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp54.226.064.000	Rp39.045.600.900	72.01
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp559.434.000	Rp279.556.913	49.97
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp23.131.210.000	Rp19.090.958.779	82.53
Total Anggaran					Rp82.484.640.000	Rp59.891.762.557	72.61



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

D. Rekomendasi Pimpinan

1. **Percepat implementasi sistem pemantauan kinerja layanan**, terutama yang terkait dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. **Optimalkan pembagian tugas dan tanggung jawab** antarunit pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih dan keterlambatan respon kepada pemangku kepentingan.
3. **Segera laksanakan survei kepuasan pengguna versi awal (baseline)** untuk memperoleh gambaran awal persepsi layanan dan sebagai pembanding triwulan berikutnya.
4. **Dorong partisipasi aktif seluruh pegawai** dalam budaya pelayanan prima melalui sosialisasi nilai-nilai pelayanan publik dan orientasi pengguna (*customer-centric mindset*).

Gorontalo , 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wil. XVI

Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas layanan terus diperbaiki. Peningkatan ini akan sangat mempengaruhi kepuasan pengguna layanan. Pada triwulan kedua ini LLDIKTI XVI lebih kepada peningkatan sistem layanan melalui aplikasi dasbor, SIPINTER dan helpdesk, dan monitoring survey kepuasan pengguna atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, LLDIKTI XVI juga mulai menyusun Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) sebagai upaya menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Kendala/Permasalahan

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur server yang dikarenakan regulasi yang melarang pengadaan server mandiri di satuan kerja. Selain itu, penggunaan server Kominfo juga memiliki banyak keterbatasan dari segi birokrasi sehingga membutuhkan lebih lama untuk menyelesaikan satu aplikasi. Sedangkan untuk POS AP, ketiadaan pelatihan yang optimal mengenai penyusunan POS AP menyebabkan pegawai yang ditugaskan belum memahami tugas dan fungsi mereka secara jelas dalam konteks standar yang baru.

Strategi/Tindak Lanjut

Menambah SDM yang berkompeten dibidang SPBE dan bidang penyusunan POS AP, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pelayanan. Selain itu parameter penilaian untuk Tingkat kepuasan pengguna akan dibuat lebih terperinci.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang mempengaruhi proses akreditasi serta melakukan pemantauan dan pendataan pada Perguruan Tinggi yang sudah habis atau mendekati masa kadaluwarsa akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi.

Di Triwulan II, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan kegiatan Workshop Strategi Peningkatan Akreditasi Unggul dan Internasional Perguruan Tinggi Swasta untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan tinggi. selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong implementasi SPMI yang lebih efektif dan berkelanjutan di setiap program studi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) sebagai dasar akreditasi unggul dan internasional.

Kendala/Permasalahan

Proses Akreditasi perguruan tinggi yang cukup lama salah satunya dikarenakan oleh migrasi Akun Sapto dari 1.0 menjadi Sapto 2.0 yang kurang tersosialisasi ke PTS. Selain itu kendala lain adalah terbatasnya komunikasi antara perguruan tinggi pengusul dengan BAN- PT atau LAM. PTS diwilayah LLDIKTI XVI juga masih butuh kerja ekstra untuk meningkatkannya dikarenakan sebagian besar PTS masih terakreditasi baik.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap status akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi serta melakukan pemantauan terkait progress pengajuan akreditasi pada sistem SAPTO 2.0.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Pemantauan laporan IKU PTS melalui PDDIKTI terus dilakukan sejalan dengan melakukan identifikasi PTS yang telah mengimplementasikan pembelajaran lintas prodi.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administrative dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendiktisaintek.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Pemantauan laporan IKU PTS melalui PDDIKTI terus dilakukan sejalan dengan melakukan identifikasi PTS yang telah mengimplementasikan pembelajaran lintas prodi.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administrative dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

kebijakan terbaru dari Kemendikisaintek.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Adanya perubahan dari PPKS menjadi PPKPT dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang menggantikan Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPKS yang fokus hanya pada kekerasan seksual. Untuk itu LLDIKTI Wilayah XVI terus memonitoring implementasi regulasi dan laporan kegiatan kekerasan di Kampus.

Kendala/Permasalahan

Saat ini LLDIKTI XVI belum mendapatkan pelaporan terkait jumlah PTS yang sudah membuat regulasi PT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong PTS untuk melaporkan regulasi PPKPT yang sudah disahkan di PTSnya masing-masing.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Untuk peningkatan persentase jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran data dosen pada SISTER dan PDDIKTI.

Kendala/Permasalahan

Pelaporan kegiatan dosen yang berkegiatan diluar kampus hanya dilaporkan melalui SISTER, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan pelaporan data dosen.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengajak Pimpinan PTS untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data dosen dapat terlaksana secara berkala.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA.

Kendala/Permasalahan

Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati. Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatkan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan Kegiatan rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I, FGD Penyusunan dan Pemantapan Prioritas Program Kerja Tahun 2026

Kendala/Permasalahan

Keterlambatan dalam penyusunan RENSTRA berpengaruh pada realisasi capaian output satker.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan optimalisasi capaian output dengan melaksanakan kegiatan pengganti agar capaian relaisasi kegiatan tetap maksimal

[S 4] Meningkatkan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Melakukan koordinasi intensif dengan KPPN dan Kanwil DjPb Gorontalo terkait percepatan pelaksanaan anggaran serta peningkatan nilai IKPA Satker

Kendala/Permasalahan

Capaian indiktor IKPA pada penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan masih memerlukan revisi penyesuaian anggaran pasca eisiensi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun strategi pelaksanaan anggaran dengan melakukan penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II untuk memenuhi penyerapan anggaran



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	44	77	Rp4.515.149.000	Rp1.508.985.149	33.42
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	11	18	Rp43.650.000	Rp19.214.780	44.02
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp54.226.064.000	Rp39.045.600.900	72.01
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp559.434.000	Rp298.694.813	53.39
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp23.131.210.000	Rp19.157.781.709	82.82
Total Anggaran					Rp82.484.640.000	Rp60.036.372.351	72.78

D. Rekomendasi Pimpinan

1. **Segera lakukan inventarisasi kebutuhan infrastruktur digital** yang kritikal, dan susun rencana prioritas pengadaan atau peningkatan kapasitas server dan jaringan.
2. **Perkuat kolaborasi lintas lembaga**, khususnya dengan instansi pusat atau perguruan tinggi mitra, untuk mendukung pelatihan SDM teknis serta berbagai infrastruktur sementara.
3. **Laksanakan pelatihan SPBE secara berjenjang**, dengan fokus pada kemampuan troubleshooting dan optimalisasi aplikasi layanan publik.
4. **Evaluasi efektivitas perbaikan layanan yang telah dilakukan**, terutama terkait kecepatan respon dan kepuasan pengguna, untuk memastikan arah perbaikan tetap sesuai target IKU.

Gorontalo , 7 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala LLDIKTI Wil. XVI
 Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

LLDIKTI XVI melaksanakan penyusunan kembali Standar Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memastikan kembali pelayanan yang diberikan semakin efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Standar yang diperbarui bertujuan untuk menyesuaikan prosedur dan indikator pelayanan agar lebih relevan dengan kondisi terkini baik dari kebutuhan Masyarakat maupun regulasi terbaru sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan terukur.

Kendala/Permasalahan

SDM yang terbatas dalam hal kompetensi teknis dan waktu menjadi salah satu kendala dalam penyusunan kembali standar pelayanan publik. Masih ada pegawai yang belum mau melakukan perubahan prosedur dikarenakan khawatir menambah beban kerja atau mengganggu rutinitas.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya penguatan kompetensi teknis pegawai untuk meningkatkan pegawai agar lebih siap melaksanakan pembaruan prosedur pelayanan publik. Disamping itu, dibutuhkan juga penataan beban kerja dan waktu untuk memastikan perubahan tidak mengganggu rutinitas dan tidak menambah beban secara signifikan.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang mempengaruhi proses akreditasi serta melakukan pemantauan dan pendataan pada Perguruan Tinggi yang sudah habis atau mendekati masa kadaluwarsa akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi.

LLDIKTI Wilayah XVI juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi kebijakan akreditasi dan Instrumen Akreditasi sesuai Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 yang bekerja sama dengan Majelis Akreditasi BAN-PT.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang dialami oleh perguruan tinggi saat pengajuan akreditasi diantaranya adalah kurangnya sosialisasi tentang penggunaan sistem SAPTO 2.0 serta informasi terkait instrumen dan mekanisme pengajuan akreditasi baik di BAN-PT maupun melalui LAM.

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap status akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi serta melakukan pemantauan terkait progress pengajuan akreditasi pada sistem SAPTO 2.0.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Selain melakukan pemantauan pelaporan IKU PTS, LLDIKTI XVI melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung berjalannya IKU III diantaranya Sosialisasi program pembelajaran berbasis digital oleh ICE Institute bagi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI. tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep pembelajaran digital yang berorientasi pada dampak. Kegiatan ini juga menjelaskan mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi, ICE Institut dan industri, menunjukkan peluang peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui kredensial mikro, serta mendorong PTS mengembangkan inovasi dan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administratif dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendikdisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun program pendampingan teknis bagi PTS yang siap mengadopsi platform ICE Institute, menyelenggarakan lokakarya lanjutan terkait pengakuan kredit, pengelolaan konten digital dan sistem pembelajaran daring, melakukan pemetaan kesiapan infrastruktur digital PTS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ICE institute secara berkala.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Selain melakukan pemantauan pelaporan IKU PTS, LLDIKTI XVI melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung berjalannya IKU III diantaranya Sosialisasi program pembelajaran berbasis digital oleh ICE Institute bagi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI. tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep pembelajaran digital yang berorientasi pada dampak. Kegiatan ini juga menjelaskan mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi, ICE Institut dan industri, menunjukkan peluang peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui kredensial mikro, serta mendorong PTS mengembangkan inovasi dan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administrative dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendikdisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun program pendampingan teknis bagi PTS yang siap mengadopsi platform ICE Institute, menyelenggarakan lokakarya lanjutan terkait pengakuan kredit, pengelolaan konten digital dan sistem pembelajaran daring, melakukan pemetaan kesiapan infrastruktur digital PTS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ICE institute secara berkala.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Adanya perubahan dari PPKS menjadi PPKPT dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang menggantikan Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPKS yang fokus hanya pada kekerasan seksual. Untuk itu LLDIKTI Wilayah XVI terus memonitoring implementasi regulasi dan laporan kegiatan kekerasan di Kampus. Sebagian besar PTS melakukan sosialisasi terkait PPKPT pada proses penerimaan mahasiswa baru (PKKMB)

Kendala/Permasalahan

Saat ini LLDIKTI XVI belum mendapatkan pelaporan terkait jumlah PTS yang sudah membuat regulasi PT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong PTS untuk melaporkan regulasi PPKPT yang sudah disahkan di PTSnya masing-masing.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Untuk peningkatan persentase jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran data dosen pada SISTER dan PDDIKTI.

Kendala/Permasalahan

Jika dilihat dari pelaporan IKU pada PDDIKTI, masih banyak PTS yang belum maksimal dalam pelaporannya. Dari hasil kegiatan tersebut, juga ditemukan masih ada Badan Penyelenggara yang belum memahami pentingnya dosen berkegiatan di luar kampus, sebagai poin dalam peningkatan Indikator Kinerja Utama.

Strategi/Tindak Lanjut

Pengawasan bagi PT dan dosen yang akan melakukan pelaporan di SISTER khususnya terkait kegiatan dosen di luar kampus. Selain itu LLDIKTI Wilayah XVI juga akan menggelar kegiatan Persamaan persepsi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT tentang dosen berkegiatan di luar kampus.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Di Triwulan III, LLDIKTI XVI mulai menginisiasi kerja sama dengan Koperasi Modern Teknologi Nusantara (KOMETA) yang merupakan koperasi multi-pihak berbasis teknologi. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun wadah pengembangan kompetensi bagi mahasiswa guna menciptakan lulusan yang berdaya saing dan berkualitas. Kegiatan ini diikuti oleh PTS yang diharapkan bisa melakukan riset dan inovasi terkait bidang digitalisasi koperasi, Pengabdian kepada Masyarakat maupun pengembangan kurikulum.

Kendala/Permasalahan

Tidak semua PTS memiliki pemahaman yang baik terkait strategisnya program Career Bootcamp bersama KOMETA. Meskipun kerja sama ini membawa potensi besar dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, namun masih program ini hanya dapat berjalan di beberapa PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Penguatan implementasi dan keberlanjutan program kolaborasi dengan memfasilitasi pembuatan roadmap kegiatan bersama yang mencakup program pengembangan kompetensi mahasiswa, riset terapan, serta kegiatan pengabdian Masyarakat. Diperlukan juga pembentukan tim kerja antara LLDIKTI bersama PTS dan KOMETA untuk mengkoordinasikan kegiatan, serta menilai hasil kolaborasi. LLDIKTI juga akan melaksanakan kegiatan Patok Banding pada Triwulan IV ke beberapa PTS Unggul yang ada di JOgjakarta. Kegiatan patok banding akan diikuti oleh perwakilan PTS dari LLDIKTI Wilayah XVI.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi dan tindak lanjut SAKIP serta Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III, Pemantapan dan revisi POS AP,

Kendala/Permasalahan

Penyusunan POS AP belum diawali dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Strategi/Tindak Lanjut

Akan dilaksanakan FGD Penyusunan Peta Proses Bisnis pada triwulan IV 2025

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melakukan koordinasi intensif dengan KPPN dan Kanwil DjPb Gorontalo terkait percepatan pelaksanaan anggaran serta peningkatan nilai IKPA Satker

Kendala/Permasalahan

Capaian indiktaor IKPA pada penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan masih memerlukan revisi penyesuaian anggaran pasca eisiensi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun strategi pelaksanaan anggaran dengan melakukan penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II untuk memenuhi penyerapan anggaran

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	69	77	Rp4.515.149.000	Rp1.508.985.149	33.42
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	17	18	Rp43.650.000	Rp19.214.780	44.02
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp54.226.064.000	Rp39.045.600.900	72.01
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp559.434.000	Rp298.694.813	53.39
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp23.131.210.000	Rp19.157.781.709	82.82
Total Anggaran					Rp82.484.640.000	Rp60.036.372.351	72.78

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Lakukan program penguatan kompetensi teknis secara sistematis, mencakup pelatihan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

intensif, *coaching*, dan *on-the-job training* untuk staf terkait pelayanan dan teknologi informasi.

2. **Bangun tim kerja lintas bidang (task force SPBE)** yang berfungsi memastikan integrasi data, percepatan respon, serta penyederhanaan proses layanan.
3. **Terapkan sistem evaluasi berbasis kinerja individu dan unit kerja**, untuk menumbuhkan tanggung jawab dan rasa kepemilikan terhadap capaian target kinerja.
4. **Lakukan survei kepuasan pengguna pasca perbaikan sistem**, guna mengukur dampak nyata dari langkah-langkah peningkatan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi dasar perbaikan menuju triwulan IV.

Gorontalo , 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wil. XVI

Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan IV Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	99.8	99.6
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	78	94
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	61.9	60.5
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	2.63	4.33
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	95.2	91.4
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	25	91.36
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	57.14	58.2
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	BB	BB
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	91	99.8



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan Keempat, LLDIKTI Wilayah XVI melanjutkan implementasi hasil penyusunan kembali Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan pada Triwulan Ketiga. Kegiatan difokuskan pada sosialisasi standar pelayanan yang telah diperbarui kepada seluruh pegawai serta uji penerapan prosedur pelayanan pada unit layanan terkait. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas pegawai melalui pendampingan teknis dan penyesuaian alur kerja untuk memastikan standar pelayanan yang baru dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, LLDIKTI Wilayah XVI juga melakukan pengumpulan umpan balik awal dari pengguna layanan guna mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap penerapan standar pelayanan yang telah diperbarui.

Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan Triwulan Keempat, masih terdapat tantangan berupa adaptasi sebagian pegawai terhadap penerapan standar pelayanan baru yang memerlukan penyesuaian pola kerja. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan menyebabkan belum seluruh pegawai dapat memperoleh pemahaman yang merata terhadap perubahan prosedur pelayanan.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan lanjutan secara bertahap serta terstruktur untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan menerapkan standar pelayanan publik yang telah diperbarui. Penguatan monitoring dan evaluasi internal juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi serta memastikan konsistensi pelayanan antar unit.

Selain itu, akan dikembangkan mekanisme pengukuran kepuasan pengguna layanan yang lebih sederhana dan mudah diakses guna mendorong partisipasi pengguna dalam memberikan umpan balik, sehingga hasil pengukuran IKU 1 dapat lebih akurat dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

LLDIKTI Wilayah XVI melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perguruan tinggi swasta yang berada dalam proses pengajuan maupun perpanjangan akreditasi, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun program studi. Kegiatan difokuskan pada pendampingan teknis bagi PTS yang telah teridentifikasi mendekati masa berakhir akreditasinya, termasuk asistensi dalam pemenuhan dokumen dan pemanfaatan sistem SAPTO 2.0.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melakukan fasilitasi konsultasi lanjutan terkait kebijakan akreditasi dan instrumen akreditasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, serta mendorong PTS dengan keterbatasan sumber daya untuk mempertimbangkan peningkatan mutu melalui penggabungan dengan PTS lain sebagai salah satu alternatif kebijakan penguatan kelembagaan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kesiapan sebagian PTS dalam memenuhi standar akreditasi, terutama terkait kelengkapan data dan konsistensi pelaporan pada sistem SAPTO 2.0. Selain itu, pemahaman terhadap mekanisme akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) belum merata di seluruh PTS.

Di sisi lain, terdapat PTS yang masih ragu atau belum memiliki kesiapan kelembagaan untuk melakukan penggabungan dengan PTS lain sebagai upaya peningkatan mutu, baik karena faktor administratif maupun pertimbangan internal yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XVI akan memperkuat kegiatan pendampingan dan konsultasi teknis secara berkelanjutan bagi PTS, khususnya terkait penggunaan sistem SAPTO 2.0 dan pemahaman instrumen akreditasi BAN-PT maupun LAM. Monitoring dan evaluasi status akreditasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan progres pengajuan akreditasi berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan penggabungan PTS secara lebih intensif, termasuk penyampaian praktik baik (best practices), guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan PTS dalam memilih strategi peningkatan mutu kelembagaan yang paling sesuai.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Upaya penguatan implementasi IKU III melalui pendampingan dan fasilitasi bagi PTS yang telah mengikuti sosialisasi program pembelajaran berbasis digital ICE Institute pada Triwulan Ketiga. Kegiatan difokuskan pada asistensi penyusunan kurikulum pembelajaran lintas program studi serta pendampingan teknis dalam pemanfaatan platform ICE Institute sebagai media pembelajaran kolaboratif.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan monitoring pelaporan IKU III oleh PTS serta melakukan inventarisasi PTS yang telah dan akan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di luar program studi, termasuk pemetaan bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dan mitra industri. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi PTS dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada dampak dan kebutuhan masyarakat.-

Kendala/Permasalahan

Salah satu kendala utama dalam penguatan implementasi IKU III adalah belum optimalnya sistem pelaporan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada PTS, baik dari sisi pembaruan data maupun integrasi antarplatform. Sebagian PTS belum melakukan pelaporan secara berkala dan konsisten, sementara data yang tersedia masih tersebar pada berbagai sistem internal perguruan tinggi yang belum terhubung dengan sistem pelaporan IKU secara terpusat. Kondisi ini menyulitkan proses monitoring, validasi data, serta pemetaan capaian IKU III secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu, perubahan fokus kebijakan nasional, yang semula berorientasi pada implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan kini bergeser ke arah Kampus Berdampak, menimbulkan tantangan adaptasi di tingkat perguruan tinggi. Sebagian PTS masih berada pada tahap penyesuaian terhadap arah kebijakan baru tersebut, khususnya dalam mengaitkan kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan indikator dampak nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Perubahan ini juga berdampak pada perlunya penyesuaian format pelaporan dan indikator kinerja yang selaras dengan kebijakan terkini, yang hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara merata oleh PTS.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan melakukan penguatan sistem pelaporan IKU III melalui penyusunan mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses oleh PTS. Upaya ini mencakup pendampingan teknis terkait tata cara pelaporan yang mutakhir, standardisasi data yang dilaporkan, serta optimalisasi pemanfaatan platform pelaporan yang terhubung dengan sistem informasi pembelajaran dan kerja sama perguruan tinggi.

Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah XVI akan melakukan sinkronisasi pemahaman kebijakan kepada PTS terkait pergeseran fokus dari MBKM menuju Kampus Berdampak, khususnya dalam konteks pembelajaran di luar program studi. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan forum diskusi yang menekankan keterkaitan antara aktivitas pembelajaran lintas program studi, kolaborasi dengan mitra, serta kontribusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Hasil penguatan pelaporan dan monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rekomendasi kebijakan, perbaikan strategi pendampingan, serta pemetaan tingkat kesiapan dan capaian PTS dalam implementasi IKU III pada periode selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan Kampus Berdampak yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Upaya penguatan implementasi IKU III melalui pendampingan dan fasilitasi bagi PTS yang telah mengikuti sosialisasi program pembelajaran berbasis digital ICE Institute pada Triwulan Ketiga. Kegiatan difokuskan pada asistensi penyusunan kurikulum pembelajaran lintas program studi serta pendampingan teknis dalam pemanfaatan platform ICE Institute sebagai media pembelajaran kolaboratif.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan monitoring pelaporan IKU III oleh PTS serta melakukan inventarisasi PTS yang telah dan akan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di luar program studi, termasuk pemetaan bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dan mitra industri. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi PTS dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada dampak dan kebutuhan masyarakat.-

Kendala/Permasalahan

Tingkat kesiapan PTS dalam mengintegrasikan pembelajaran lintas program studi ke dalam kurikulum yang berlaku. Sebagian dosen masih memerlukan waktu dan peningkatan kapasitas untuk beradaptasi dengan model pembelajaran digital dan kolaboratif, khususnya dalam pengelolaan konten serta asesmen pembelajaran.

Selain itu, adanya penyesuaian kebijakan pasca pemisahan kementerian menyebabkan beberapa panduan teknis dan program pendukung pembelajaran di luar program studi belum sepenuhnya tersedia, sehingga implementasi pada sebagian PTS masih berjalan secara terbatas.

Strategi/Tindak Lanjut

Melanjutkan program pendampingan teknis secara bertahap bagi PTS yang siap mengimplementasikan pembelajaran di luar program studi, termasuk melalui lokakarya lanjutan terkait pengakuan kredit (rekognisi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pembelajaran), pengelolaan konten digital, dan sistem pembelajaran daring.

Selain itu, akan dilakukan pemetaan lanjutan terhadap kesiapan infrastruktur dan sumber daya PTS serta penguatan monitoring dan evaluasi implementasi ICE Institute secara berkala. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pendampingan pada periode selanjutnya, seiring dengan arah kebijakan dan program unggulan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan Keempat, LLDIKTI Wilayah XVI melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Kegiatan difokuskan pada pengumpulan dan verifikasi laporan dari PTS terkait penyusunan dan pengesahan regulasi internal PPKPT di lingkungan masing-masing perguruan tinggi.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melakukan sosialisasi lanjutan kepada PTS mengenai cakupan dan substansi kebijakan PPKPT yang mencakup pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, intoleransi, perundungan, penyalahgunaan narkoba, serta praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan Triwulan Keempat, masih ditemukan keterlambatan pelaporan dari sebagian PTS terkait regulasi PPKPT yang telah disahkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tahapan penyusunan regulasi internal di masing-masing PTS serta keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

Selain itu, masih terdapat PTS yang berada pada tahap penyesuaian substansi regulasi internal agar selaras dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sehingga implementasi kebijakan PPKPT belum dapat dilaporkan secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan terus mendorong PTS untuk segera menyampaikan laporan regulasi PPKPT yang telah disahkan, baik melalui surat resmi maupun sistem pelaporan yang ditetapkan. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan PTS juga akan dilakukan untuk memastikan percepatan penyusunan dan implementasi regulasi PPKPT.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan menyusun rekapitulasi data PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan PPKPT sebagai dasar pemantauan capaian IKU V serta bahan evaluasi dan pembinaan pada periode berikutnya.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Upaya peningkatan pelaporan dan validasi data dosen yang berkegiatan di luar kampus melalui sistem



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SISTER dan PDDIKTI terus dilakukan. Kegiatan difokuskan pada pendampingan teknis kepada PTS dan dosen terkait pemutakhiran data kegiatan tridarma di luar kampus, termasuk kegiatan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dengan industri, serta keterlibatan dalam kegiatan profesional lainnya. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS mengenai pentingnya dosen berkegiatan di luar kampus sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja institusi dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama.

Kendala/Permasalahan

Salah satu permasalahan utama dalam peningkatan pelaporan dosen yang berkegiatan di luar kampus adalah belum optimalnya sistem pelaporan pada SISTER dan PDDIKTI yang bersifat parsial, belum terintegrasi, serta belum sepenuhnya ter-update secara berkala. Data kegiatan dosen di luar kampus, seperti penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dengan industri, dan aktivitas profesional lainnya, masih tersebar pada berbagai sistem internal PTS dan belum seluruhnya tersinkronisasi dengan sistem nasional. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembaruan data, inkonsistensi informasi, serta kesulitan dalam proses validasi dan rekapitulasi capaian IKU secara akurat.

Selain itu, perubahan arah kebijakan nasional yang semula berfokus pada implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan saat ini bergeser menuju paradigma Kampus Berdampak menimbulkan tantangan adaptasi bagi PTS dan dosen. Sebagian perguruan tinggi masih dalam tahap penyesuaian terhadap indikator, bentuk kegiatan, dan mekanisme pelaporan yang relevan dengan kebijakan baru tersebut. Perubahan fokus kebijakan ini berdampak pada belum seragamnya pemahaman PTS dalam mengaitkan kegiatan dosen di luar kampus dengan capaian dampak nyata serta pelaporan yang sesuai dengan indikator kinerja yang berlaku.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, LLDIKTI Wilayah XVI akan melakukan penguatan dan pembenahan sistem pelaporan kegiatan dosen di luar kampus melalui optimalisasi pemanfaatan SISTER dan PDDIKTI, termasuk mendorong pembaruan data secara berkala dan peningkatan integrasi data antara sistem internal PTS dan sistem nasional. Pendampingan teknis akan difokuskan pada standarisasi pengisian data, peningkatan pemahaman teknis operator dan dosen, serta validasi data agar pelaporan lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan melaksanakan sosialisasi dan penyamaan persepsi kebijakan kepada Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS terkait pergeseran fokus dari MBKM menuju Kampus Berdampak, khususnya dalam konteks kegiatan dosen di luar kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dosen tidak hanya terlapor secara administratif, tetapi juga selaras dengan orientasi dampak bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Hasil penguatan sistem pelaporan dan monitoring tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi capaian IKU, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta perumusan strategi pendampingan lanjutan bagi PTS, sejalan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi dan penguatan peran dosen dalam mewujudkan Kampus Berdampak.

[S 3] Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Ditriwulan IV, LLDIKTI XVI memfasilitasi 52 Perguruan Tinggi yang ada di lingkup LLDIKTI XVI untuk mengikuti fasilitasi kerja sama bersama PTS Unggul yang ada di Yogyakarta diantaranya Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, dan STIKES Panti Rapih Yogyakarta. Dari hasil kunjungan tersebut, tercatat 24 Perguruan Tinggi melakukan penandatanganan kerja sama bersama dengan PTS Unggul. Selain itu, LLDIKTI XVI juga tidak hanya memfasilitasi penandatanganan kerja sama dalam bentuk MoU namun juga turut mendampingi dalam pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dalam bentuk MoA.

Kendala/Permasalahan

Masih terdapat PTS dan program studi yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung untuk mengimplementasikan kerja sama secara optimal. Selain itu, sebagian PTS masih mengalami kendala dalam penyediaan pendanaan untuk mendukung kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan kerja sama mitra. Perbedaan tingkat kesiapan antar PTS juga menyebabkan implementasi kerja sama belum merata di seluruh program studi yang terlibat.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kerja sama, termasuk penilaian jumlah dan kualitas program studi yang telah mengimplementasikan kerja sama dengan mitra, sebagai dasar perbaikan dan pengembangan model kolaborasi pada periode selanjutnya.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil penilaian SAKIP tahun 2024,. Beberapa upaya yang telah dilakukan yakni pengumpulan pelaporan pajak SPT Tahunan, SKP 2024 dan rencana SKP 2025 ASN LLDIKTI, serta melaksanakan FGD terkait program prioritas tahun 2025 .

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan kinerja yakni masih terdapat beberapa Pegawai yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan No. 6 Tahun 2022 serta masih terdapat pegawai yang belum menyusun komitmen kinerja yang selaras dengan target ketua tim atau kepala lembaga.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pendekatan ke masing-masing tim kerja agar pegawai dalam timnya dapat menyusun komitmen kinerja. Serta mengkoordinasikan dengan seluruh ASN untuk penyusunan Evaluasi SKP dan Rencana SKP 2025.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, LLDIKTI Wilayah XVI secara



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

intensif melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN, khususnya terkait pemenuhan parameter IKPA/NKA (ketepatan perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta ketertiban administrasi dan pelaporan). Upaya penguatan pengendalian internal juga terus dilakukan melalui komunikasi rutin antara unit pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Hasilnya, capaian NKA mencapai 99,8, melampaui target 91.

Kendala/Permasalahan

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama tingginya volume kegiatan dengan keterbatasan jumlah SDM pelaksana. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan beberapa aktivitas, sehingga pada periode tertentu dapat menimbulkan deviasi realisasi yang tidak sepenuhnya sesuai proyeksi awal. Selain itu, koordinasi lintas tim kerja dengan pengelola keuangan masih memerlukan penguatan agar seluruh tahapan perencanaan dan eksekusi kegiatan tetap konsisten dan terdokumentasi secara baik.

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan capaian yang tinggi sekaligus meminimalkan deviasi pada periode berikutnya, LLDIKTI Wilayah XVI akan mengintensifkan koordinasi secara berkelanjutan, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal, termasuk Kanwil DJPb dan KPPN, guna memastikan seluruh parameter Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI akan melaksanakan reviu serta monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk melakukan penjadwalan ulang maupun penyesuaian langkah kerja apabila diperlukan, agar pelaksanaan tetap selaras dengan rencana. Di saat yang sama, langkah mitigasi dan tindakan korektif akan disiapkan lebih dini apabila teridentifikasi potensi keterlambatan, deviasi, atau kendala administrasi, sehingga dampaknya terhadap pelaksanaan anggaran dapat ditekan dan capaian kinerja tetap terjaga pada level sangat baik.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	81	81	Rp4.517.759.000	Rp2.258.788.248	50.00
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	20	20	Rp41.040.000	Rp19.214.780	46.82
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp52.972.064.000	Rp51.820.963.400	97.83



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp630.792.000	Rp575.782.403	91.28
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp24.313.852.000	Rp23.451.997.071	96.46
Total Anggaran					Rp82.484.640.000	Rp78.132.840.902	94.72

D. Rekomendasi Pimpinan

1. **Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian indikator kepuasan pengguna**, dengan memastikan bahwa data survei yang digunakan bersifat valid, reliabel, dan mencerminkan kondisi layanan yang sebenarnya.
2. **Konsolidasikan seluruh praktik baik (best practices)** peningkatan layanan yang terbukti efektif sepanjang tahun 2025 untuk dijadikan standar operasional tetap pada tahun berikutnya.
3. **Pastikan keberlanjutan peningkatan mutu layanan** melalui penguatan regulasi internal, penyempurnaan SOP, dan integrasi layanan berbasis SPBE secara end-to-end.
4. **Gunakan hasil pengukuran kinerja Triwulan IV sebagai dasar perencanaan kinerja tahun 2026**, khususnya dalam penetapan target yang lebih adaptif, realistis, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
5. **Dorong budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)** di seluruh unit kerja dengan menjadikan kepuasan pengguna sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan publik LLDIKTI XVI.

Gorontalo , 14 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Munawir Sadzali Razak
---	--



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo , 26 Januari 2026
Ketua Tim Reviu,



Dr. Rukiah Nggilu , S.IP, M.Si

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

LAPORAN KINERJA 2025



LLDIKTI WILAYAH XVI

    @lldiktiwil16

 lldikti16_gtlo@kemdiktisaintek.go.id

 <https://lldikti16.kemdibud.go.id>

 Helpdesk 0877 6016 1616

 **LLDIKTI WILAYAH XVI**
Tautan undangan saluran
<https://whatsapp.com/channel/0029VaxoukdKwQzNzTn0H>